

**KECENDERUNGAN PEMBERITAAN KONFLIK
WARGA PULAU PADANG KABUPATEN MERANTI
DENGAN PT. RAPP DI HARIAN RIAU POS
DAN TRIBUN PEKANBARU
(ANALISIS *FRAMING* BERITA EDISI 1 – 7 JUNI 2011)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi
Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi**



Oleh:

ARIE GUNAWAN
NIM: 10643004269

**PROGRAM S1 JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Kecenderungan Pemberitaan Konflik Warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT. RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru (Analisis *Framing* Berita Edisi 1 – 7 Juni 2011)**” yang ditulis oleh:

Nama : Arie Gunawan
NIM : 10643004269
Jurusan : Ilmu Komunikasi

Telah dimunaqasahkan dalam sidang ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Juni 2012

Sehingga skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Pekanbaru, 6 Juni 2011
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. Amril, M.MA

NIP: 19561231 197603 1 042

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dra. Silawati, M.Pd

NIP:19690902 199503 2 001

Penguji I

Imron Rosidi, MA

NIP: 19811118 200901 1 006

Penguji II

Masduki, M.Ag

NIP: 19710612 199803 1 003

Toni Hartono, M.Si

NIP: 19780605 200701 1 024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Alasan Memilih Judul	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Permasalahan	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teoritis	10
G. Konsep Operasional	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Perkembangan Riau Pos	24
B. Sejarah Berdirinya Harian Tribun Pekanbaru	30
C. Sekilas Konflik Pulau Padang	36
BAB III PENYAJIAN DATA	
A. Pengantar	40
B. Framing Berita Konflik Warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru	44
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pengantar	57
B. Analisis Framing Berita Riau Pos	68
C. Analisis Framing Berita Tribun Pekanbaru	65
D. Rangkuman Hasil Analisis	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
TENTANG PENULIS	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Daftar Berita Konflik di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekabaru edisi 1 – 7 Juni 2011	41
Tabel IV.1	Hasil analisis <i>framing</i> berita Riau Pos	63
Tabel IV.2	Hasil analisis <i>framing</i> berita Tribun Pekanbaru	71
Tabel IV.3	Rangkuman hasil analisis	72

**KECENDERUNGAN PEMBERITAAN KONFLIK WARGA PULAU
PADANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DENGAN PT. RAPP
DI HARIAN RIAU POS DAN HARIAN TRIBUN PEKANBARU
(ANALISIS *FRAMING* BERITA EDISI 1 – 7 JUNI 2011)**

ABSTRAK

Konflik selalu menarik untuk dikaji secara mendalam, termasuk oleh para wartawan yang meliput dan menginformasikan kejadian tersebut kepada khalayak. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kecenderungan pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru ditinjau dari teori *framing* yang dikemukakan oleh Robert N Entman.

Untuk itu penulis melakukan penelitian analisis *framing* pada berita yang dimuat edisi 1 – 7 Juni 2011 dengan merujuk pada konsep analisis *framing* yang dikemukakan oleh Robert N Entman. Ia merumuskan *framing* ke dalam empat dimensi besar, yaitu: pertama, definisi masalah, bagaimana peristiwa atau masalah dilihat oleh media; kedua, memperkirakan penyebab masalah, apa yang dianggap sebagai penyebab masalah; ketiga, membuat keputusan moral, nilai moral apa yang digunakan dalam melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan; keempat, menekankan penyelesaian, seperti apa penyelesaian yang ditawarkan media pada peristiwa tersebut.

Penulis menemukan enam berita pada periode tersebut, dimana masing-masing media memuat tiga berita terkait konflik. Selanjutnya data dianalisa dengan analisis *framing* yang dikemukakan oleh Robert N Entman dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat.

Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan Harian Riau Pos memandang masalah tersebut sebagai anarkis massa, penyebab masalah karena berbeda pandangan soal izin HTI PT. RAPP, menilai secara moral peristiwa tersebut merugikan banyak pihak termasuk pemerintah dan menyarankan penyelesaian masalah secara musyawarah dan persuasif. Sedangkan Harian Tribun Pekanbaru memandang masalah sebagai upaya kambinghitam (*fitnah*) kepada STR, penyebab masalah ialah akumulasi persoalan terkait izin HTI PT. RAPP, menilai secara moral izin HTI PT. RAPP merusak lingkungan serta menyarankan penyelesaian dengan menghentikan operasional perusahaan dan tinjau ulang izin HTI PT. RAPP.

Kata kunci: *Framing*, Konflik, Pulau Padang, PT. RAPP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik memang selalu menarik untuk dikaji secara dalam dan ilmiah. Hal ini dikarenakan perkembangan dunia yang tidak pernah sepi dari perang, konflik, pertikaian dan jauh dari rasa aman (Sambo, 2007). Para pakar sibuk alang kepalang untuk mencari sebab konflik dan solusinya. Tujuannya, agar masyarakat menikmati kata kemerdekaan yang sebenarnya. Merdeka dari rasa takut, merdeka untuk mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Dewasa ini, kajian tentang Jurnalisme Damai memang hangat dibicarakan oleh kalangan publisistik, Jurnalistik, Ilmu Komunikasi dan para wartawan sebagai pelaku kegiatan meliput peristiwa konflik itu sendiri.

War Journalism (Jurnalisme Perang) bukanlah hal baru dalam dunia jurnalistik. Jurnalisme Perang atau dengan istilah lain dikenal dengan sebutan wartawan perang telah lahir bukan hanya di Indonesia (Sambo, 2007). Namun, negara-negara seperti Amerika juga memiliki wartawan jenis ini. Wartawan perang merupakan wartawan-wartawan yang cenderung mengedepankan sisi-sisi pemberitaan yang ditangkap dari konflik itu sendiri. Tanpa memikirkan efek pemberitaan terhadap masyarakat (publik) yang membacanya. Misalnya, seorang wartawan memberitakan tentang peristiwa kontak tembak di Nisam Ateuh Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Kontak tembak tersebut digambarkan dengan

mengedepankan jumlah korban, berapa korban dari pihak GAM dan berapa korban dari pihak TNI. Kemudian, tidak lupa, si wartawan juga menuliskan tentang amis darah dan lain sebagainya yang dapat ditangkap secara langsung oleh indera penglihatannya. Tidak jarang pula wartawan perang ini, hanya menulis peristiwa kontak tembak dari jarak sekian ribu meter. Sebenarnya, dia sendiri tidak tahu persis tentang cerita kontak tembak tersebut. Inilah yang dinamakan wartawan perang (Sambo, 2007).

Ilustrasi di atas dapat dimaknai, jika si wartawan menulis bau amis darah dan kematian dalam situasi konflik seperti itu, alamat konflik di daerah tersebut semakin memanas. Karena orang-orang yang bertikai akan semakin dendam saat melihat angka-angka korban jiwa dan amis darah. Bukankah ini semakin memeruncing suasana?

Lalu bagaimana dengan aliran *Peace Journalism*? Aliran ini mengamanahkan kepada wartawan yang meliput konflik agar cenderung mengedepankan sisi –sisi humanis dari konflik itu sendiri. Sesungguhnya, wartawan yang menulis berita dan karena berita itu orang-orang yang bertikai semakin menyimpan dendam, maka wartawan juga turut berdosa dalam konflik tersebut (Sambo, 2007). Mengedepankan sisi-sisi humanis (kemanusiaan) merupakan ciri khas dari Jurnalisme Damai. Misalnya, saat terjadi kontak tembak antara TNI dan GAM di Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie, maka wartawan yang mengusung aliran ini akan mengangkat efek dari konflik itu sendiri. Banyak sekali efek yang dapat diangkat dalam sebuah konflik, sebut saja diantaranya tentang calon pengantin yang

seharusnya menikah besok pagi. Namun, karena hari ini terjadi perang, maka dia gagal menikah. Pasalnya si pengantin terkena peluru nyasar saat kontak tembak itu terjadi. Setelah mengulas *angle* (sudut pandang) ini, maka baru dibalut dengan beberapa orang korban jiwa dan lain sebagainya sebagai pelengkap data.

Aliran *Peace Journalism* (Jurnalisme Damai) ini dikembangkan oleh Johan Galtung, seorang profesor di bidang Ilmu Damai *European Peace University*. Ilmu Galtung berawal dari niat baiknya untuk mencari salah satu solusi dari perang dan konflik itu sendiri. Ia pertama kali memperkenalkan istilah ini pada tahun 1970-an. Awalnya ia mencermati banyaknya Jurnalisme Perang yang mendasarkan diri pada asumsi yang sama seperti halnya wartawan olahraga. Isinya hanya terfokus pada ”kemenangan penting” dalam sebuah ”permainan menang-kalah” antara dua belah pihak (Nurudin, 2009: 238).

Melihat dampak yang ditimbulkannya, ia mengusulkan istilah Jurnalisme Damai yang tidak mengikuti liputan wartawan olahraga tetapi liputan model wartawan kesehatan. Seorang wartawan kesehatan akan menjelaskan perjuangan yang diderita seorang pasien melawan sel-sel kanker, misalnya yang menggerogoti tubuhnya. Wartawan itu akan terlibat untuk menjelaskan kepada pembacanya tentang penyebab terjadinya kanker. Misalnya gaya hidup penderita, lingkungan sekitar, faktor genetik dan hal lain yang bisa menggambarkan timbulnya penyakit itu. Termasuk hal-hal lain yang berkaitan dengan pencegahan yang bisa dilakukan sebelumnya.

Sebenarnya ada banyak nama lain dari Jurnalisme Damai antara lain: jurnalisme baru, jurnalisme pasca-realis, jurnalisme solusi, jurnalisme yang menguatkan, jurnalisme analisis konflik, jurnalisme perubahan, jurnalisme holistik, jurnalisme dengan kerangka besar, jurnalisme sebagai mediator (penengah), jurnalisme untuk masyarakat terbuka (*open society*), jurnalisme pembangunan, jurnalisme analisis, jurnalisme reflektif dan jurnalisme konstuktif. (Nurudin, 2009: 239)

Pada penelitian ini, penulis tertarik mengangkat pemberitaan konflik warga Pulau Padang, Kabupaten Meranti dengan PT RAPP dimana perusahaan *pulp and paper* ini melakukan ekspansi usaha ke Pulau Padang. Namun sejauh ini, warga tempatan tidak setuju dengan rencana tersebut. Masalah ini menimbulkan gejolak di masyarakat dan terjadi peristiwa-peristiwa yang punya nilai berita tinggi. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan atau pun kecenderungan surat kabar Riau Pos dan Tribun Pekanbaru sebagai koran daerah dalam melakukan rekonstruksi peristiwa pro kontra konflik antara perusahaan PT RAPP dengan warga Pulau Padang. PT RAPP telah mengantongi izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Pulau Padang. Namun masyarakat menduga dalam mendapatkan izin tersebut pihak perusahaan melakukan manipulasi dan pemalsuan dokumen.

Konflik berkepanjangan di Pulau Padang yang meliputi 14 desa dipicu oleh keluarnya izin perusahaan HTI PT RAPP tanggal 21 Juni 2009 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.327/Menhut-II/2009 seluas 350.165 hektar, dimana yang masuk di Pulau Padang seluas 41.205 hektar.

Konsesi RAPP di Pulau Padang ini sebagian besar tumpang tindih dengan tanah-tanah yang sudah menjadi hak masyarakat lokal, baik berupa perkebunan karet, sagu, maupun areal perladangan dan eks perladangan dan perkebunan. Karena PT RAPP memaksakan beroperasi tanpa mendengarkan keberatan masyarakat sehingga penolakan besaran-besaran masyarakat melalui demonstrasi sering kali terjadi, bahkan hingga ke Jakarta.

Bermula dari PT RAPP memaksa memasukkan alat berat pada Mei lalu di Tanjung Padang, masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Riau berupaya menghambat agar alat berat berhenti bekerja dan sebelum ada penyelesaian yang dapat diterima masyarakat. Tepatnya tanggal 30 Mei dari pagi hingga sore (05.30 WIB) masyarakat demonstrasi menghambat operasi alat berat di lokasi pelabuhan yang sedang dibangun RAPP di desa Pulau Padang, pelabuhan ini adalah akses utama RAPP untuk masuk memulai penebangan hutan alam di tengah pulau dan mengeluarkan kayu *log* dan *chip* untuk kemudian dibawa ke Pelabuhan Futong di Sungai Apit Kabupaten Siak dan diteruskan ke pabrik bubur dan kertas PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Tengah malam pada hari yang sama terjadi peristiwa pembakaran dua alat berat di lokasi dimana demostrasi dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal. (Riduan: 2011)

Peristiwa tersebut lalu diberitakan oleh media massa di Riau dengan *framing* (pembingkai) masing-masing pada Rabu, 1 Juni 2011, termasuk Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru. Selama tujuh hari, kedua koran terkemuka ini terus melakukan *update* (pembaruan) perkembangan kasus dari hari ke hari.

Guna mengetahui bagaimana *framing* berita konflik warga Pulau Padang, Kepulauan Meranti dengan PT. RAPP tersebut di Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru, maka penulis tertarik mengangkatnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **“Kecenderungan Pemberitaan Konflik Warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru (Analisis Framing Berita Edisi 1 – 7 Juni 2011”**.

B. Alasan memilih Judul

1. Penulis tertarik mengangkat berita konflik warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP yang menimbulkan kontroversi dan perdebatan di masyarakat dan pemerintah.
2. Riau Pos dan Tribun Pekanbaru sebagai koran daerah di Riau masing-masing memiliki latar belakang pendirian yang berbeda, untuk itu perlu diketahui *framing* yang ditampilkan kedua media ini dalam memberitakan konflik warga Pulau Padang dan PT RAPP.
3. Penelitian ini masih dalam lingkup Jurusan Ilmu Komunikasi dan prodi Jurnalistik sesuai studi peneliti.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemakaian istilah mengenai judul dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan

dalam penelitian ini yang nantinya akan dijadikan pegangan dan pedoman dalam penelitian.

1. *Framing*

Analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khusus untuk menganalisis teks media (Sobur, 2002: 161). *Framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media (Eriyanto, 2007: 66). Adapun maksud bagaimana sebuah media memandang realitas yang ada dan bagian sisi mana yang lebih ditekankan oleh media tersebut. *Framing* merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak dingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya, G.J Adjondro (dalam Sobur, 2002: 165).

2. *Konflik*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Diknas, 2008: 305), arti konflik adalah perselisihan; pertempuran; bentrokan.

3. *Pulau Padang*

Pulau Padang termasuk salah satu pulau yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten ini sendiri baru terbentuk pada Agustus 2008 dan menjadi kabupaten ke 12 di Provinsi Riau. (Wikipedia: 2012).

4. *RAPP*

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) adalah perusahaan pengolah bubur kertas yang beroperasi di beberapa wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau, antara lain Pelalawan dan Siak. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan yang memiliki konsentrasi usaha tersendiri.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Apakah wartawan mengetahui apa itu *framing* berita?
- b. Bagaimana sikap media dalam memandang konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP?
- c. Bagaimana *framing* pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP ditinjau dari teori *framing* yang dikemukakan oleh Robert N. Entman?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka yang penulis teliti dalam skripsi ini adalah kecenderungan pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP ditinjau dari teori *framing* yang dikemukakan oleh Robert N Entman, di media massa cetak yakni Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru. Penulis memilih kedua media ini karena menurut peneliti dua media cetak ini merupakan media terbesar di Riau. Harian Riau Pos merupakan koran pertama di Riau dan termasuk dalam jaringan Jawa Pos News Network (JPNN)

sedangkan Harian Tribun Pekanbaru merupakan koran yang tergabung dalam grup Kompas Gramedia dimana dalam waktu singkat telah mampu bersaing dengan media lainnya dalam hal oplah dan pembaca.

3. Perumusan Masalah

Bagaimana kecenderungan pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru ditinjau dari teori *framing* pemberitaan yang dikemukakan oleh Robert N Entman?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kecenderungan pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru ditinjau dari teori *framing* pemberitaan yang dikemukakan oleh Robert N Entman.

2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang pola atau cara pandang suatu media dalam menyajikan berita kepada pembaca.
- b. Sebagai wadah bagi penulis untuk memahami serta mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh.

- c. Sebagai salah satu acuan untuk pengembangan selanjutnya mengenai analisis *framing* bagi mahasiswa.
- d. Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.

F. Kerangka Teoritis

1. *Framing*

Pada dasarnya, analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media (Sobur, 2002: 161). *Framing* atau *media package* adalah perspektif yang digunakan dalam melakukan pengamatan analisis dan interpretasi. Sebenarnya *framing* ini sudah pernah dilakukan oleh Ishadi Soetopo KS (Sobur, 2002: 157) yang menyoroti ihwal penggunaan berita-berita pembangunan yang diberitakan oleh surat kabar terkemuka di Indonesia.

Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. *Framing* secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa (Burhan Bungin: 2006). Sobur (2001:162) mengatakan bahwa analisis *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang dan perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang

diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut.

Framing merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya (Sudibyo, 2001: 186). Dengan kata lain bagaimana realitas dibingkai, dikonstruksi dan dimaknai oleh media.

Analisis *framing* data menggunakan model Robert Entman, dimana Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu (Eriyanto, 2002: 187). Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan dan tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.

Penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu berkaitan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. Misalnya penempatan-penempatan yang mencolok (di *headline* depan atau belakang), pengulangan, pemakaian grafis, pemakaian label tertentu untuk menggambarkan orang atau

peristiwa, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan sebagainya (Kriyantono, 2006: 253).

Dari pemikiran di atas, Entman merumuskannya ke dalam bentuk model *framing* sebagai berikut:

a. Definisi Masalah (*Defining Problems*):

Bagaimana suatu peristiwa dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Misalnya, ketika ada demonstrasi karyawan dan diakhiri bentrokan. Peristiwa itu bisa dipahami sebagai “anarkisme karyawan” atau juga bisa dipahami sebagai “pengorbanan karyawan”.

b. Memperkirakan sumber masalah (*Diagnose Cause*):

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Misalnya, penyerbuan tentara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) terhadap TNI dapat dipahami sebagai upaya GAM merusak gencatan senjata, maka penyebab masalah adalah GAM. Sedangkan TNI hanyalah korban.

c. Membuat keputusan moral (*Make Moral Judgement*):

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Misalnya, dalam contoh peristiwa penyerbuan GAM. Bila wartawan memaknai sebagai upaya mengganggu perjanjian damai, maka dalam teks berita biasanya dijumpai serangkaian pilihan moral. Misalnya,

“GAM adalah kelompok yang tidak cinta damai dan pengganggu stabilitas”.

- d. Menekankan penyelesaian (*Treatment Recommendation/ Suggest Remedies*):

Penyelesaian apa yang ditawarkan media untuk mengatasi masalah itu? Misalnya, media menganggap bahwa aksi demonstrasi mahasiswa adalah wajar.

2. Berita

Secara teknis berita baru muncul hanya setelah dilaporkan segala hal yang diperoleh di lapangan dan masih akan dilaporkan, belum merupakan berita. Hasil lapangan masih tetap merupakan peristiwa itu sendiri, atau berita yang disaksikan oleh reporter. Berita tidak lain adalah peristiwa yang dilaporkan. Berita harus selalu dengan peristiwa dan peristiwa harus dengan jalan cerita (Simbolon, 1997:88). Layak berita atau nilai kejadian merupakan persyaratan awal sebelum menulis jurnalistik. Ini karena tiada guna menulis berita kalau tidak layak disiarkan surat kabar atau majalah. Peristiwa atau kejadian yang mempunyai nilai berita atau layak berita adalah mengandung satu atau beberapa unsur berikut ini:

- a. *Significance* (penting), yaitu kejadian yang berkemungkinan memengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca.

- b. *Magnitude* (besar), yaitu kejadian menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang berakibat dapat dijumlahkan dalam angka menarik bagi pembaca.
- c. *Timeliness* (waktu), yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal baru terjadi atau baru dikemukakan. Pembaca akan tertarik dengan peristiwa yang masih hangat dan aktual.
- d. *Proximity* (kedekatan), yaitu kejadian yang dekat bagi pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis maupun emosional. Pembaca lebih tertarik bila pemberitaan yang disajikan memiliki kedekatan baginya, baik secara emosional maupun secara geografis.
- e. *Prominence* (tenar), yaitu menyangkut hal-hal terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca, seperti orang, benda, atau tempat.
- f. *Human interest* (manusiawi), yaitu kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa.

Keenam unsur layak berita diurutkan dari atas ke bawah. Kemudian dilihat apakah unsur layak berita dimiliki semua peristiwa lebih banyak tersebar pada posisi yang mendekati unsur signifikan. Semakin banyak unsur informasi yang mendekati urutan teratas yaitu unsur signifikan maka semakin penting informasi itu bagi pembaca. Sebaliknya semakin banyak unsur informasi yang mendekati urutan terbawah, yaitu unsur manusiawi maka semakin menarik berita.

Dalam realitas, bisa saja unsur yang bernilai penting sama banyaknya dengan unsur yang bernilai menarik. Kalau ini terjadi, maka informasi seperti itu bisa menjadi berita andalan. Meski demikian, informasi yang hanya memiliki unsur penting tetap layak diberitakan. Hal yang sama berlaku pula bagi informasi yang hanya unsur menarik tetap layak diberitakan. Sebagai pembaca kita tentu paham, selain membaca yang penting kita pun perlu membaca berita yang menarik. Perlu ada variasi agar tidak terjadi kejenuhan, (Siregar, 1996:30).

Menurut Suhandang (2004: 115) keseluruhan bangunan naskah suatu berita terdiri atas tiga unsur, yaitu: *headline* (judul berita) *lead* (teras berita) dan *body* (kelengkapan / penjelasan berita).

a. *Headline* (judul berita)

Hakekatnya *headline* merupakan intisari dari berita. Biasanya dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakannya, untuk dimengerti dan dinikmati pembaca, penonton maupun pendengarnya. *Headline* dibuat tidak seragam, penyajian *headline* diusahakan agar masing-masing berita dapat ditonjolkan lain dari yang lain. Selain bunyi pernyataannya (radio dan televisi), juga jenis ukuran, serta penyusunan huruf atau katanya (khusus surat kabar dan majalah) dibuat sedemikian rupa sehingga melalui *headline*-nya memiliki daya tarik tersendiri. Di samping itu fungsi *headline* juga sebagai penarik khalayak sehingga khalayak merasa terpanggil dan mau membaca, mendengar maupun menonton beritanya.

Minimal khalayak tahu apa yang menjadi pokok pemberitaannya. Hal ini dilakukan biasanya karena bagi sebagian khalayak tidak memiliki banyak waktu untuk membaca keseluruhan isi berita, sehingga dengan membaca, menonton atau mendengar *headline* secara tidak langsung telah memperoleh informasi dari apa yang diberitakan itu.

b. *Lead* (teras berita)

Apabila *headline* merupakan intisari dari suatu peristiwa, maka *lead* (teras berita) merupakan sari berita itu. Sebagai sari dari suatu berita, *lead* merupakan laporan singkat yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkannya. Untuk menjawab pertanyaan yang timbul dari nurani pembaca, *lead* harus disusun secara cepat yaitu dengan merumuskan pertanyaan sesuai dengan kaidah 5W + 1H (*what, who, when, where, why and how*).

Kehadiran *lead* ini disebabkan sempitnya waktu yang dimiliki oleh pembaca, penonton maupun pendengar untuk mengetahui informasi penting. Karenanya penulis berita melayaninya dengan menyuguhkan *lead* pada naskah beritanya. Untuk itu pula *lead* harus bisa menggambarkan peristiwa sesingkat mungkin, dalam arti semua fakta terutama dari peristiwa yang diberitakannya dapat memenuhi rasa penasaran (ingin tahu) pembaca, penonton maupun pendengarnya.

c. *Body* (tubuh / kelengkapan berita)

Body atau tubuh berita merupakan naskah suatu berita yang ditemukan setelah *headline* atau *lead*. Pada *body* ini dapat kita jumpai semua keterangan secara rinci dan dapat melengkapi serta memperjelas fakta atau data yang disuguhkan dalam *lead*. Rincian keterangan atau penjelasan dimaksud adalah hal-hal yang belum terungkap pada *lead*-nya. Karena itu bagian *body* ini juga sering disebut ‘sisir’ berita.

Menurut (Suhandang, 2004: 131) walau hanya ‘sisir’, penjelasan harus tetap dimengerti oleh khalayak, sehingga pembaca, penonton maupun pendengarnya tetap tertarik mengikuti berita tersebut sampai akhir berita.

Adapun kiat menarik perhatian khalayak, ada empat macam cara penyajian *body* berita (Suhandang, 2004: 131 – 138), yaitu:

- 1) Berbentuk piramida. *Body* berita dimaksud disusun dalam bentuk untaian cerita. Dimulai dengan hal – hal kurang penting, kemudian meningkat pada hal – hal penting dan diakhiri dengan yang terpenting atau klimaks dari peristiwa yang diberitakannya.
- 2) Berbentuk kronologis. Sesuai dengan istilahnya, kronologis yang menjadi dasar konstruksi adalah rentetan jalannya peristiwa yang diberitakan.
- 3) Berbentuk piramida terbalik (*inverted pyramid*). *Body* berita ini merupakan kebalikan dari bentuk yang pertama yaitu bentuk piramida.

- 4) Berbentuk blok paragraph. Bentuk *body* berita ini semua bagian dari peristiwa yang diberitakannya dianggap sama pentingnya.

3. Orientasi Berita

Setiap berita yang ditampilkan atau dihadirkan kepada pembaca, memiliki tiga jenis orientasi, yaitu berita positif, berita negatif dan berita berimbang. Berita positif adalah berita yang bersifat mendukung dan memberikan apresiasi. Berita negatif adalah berita yang lebih berdasarkan temuan di lapangan atau hasil wawancara namun tanpa dikonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan dengan berita tersebut. Sedangkan berita berimbang adalah berita yang didasarkan pada temuan di lapangan atau hasil wawancara lalu dikonfirmasi kepada kedua belah pihak yang bersangkutan, atau berita hasil wawancara dan dicocokkan dengan keadaan yang sesungguhnya (Malemi, 2009: 106).

4. Gatekeeper

Gatekeeper adalah penjagaan gerbang (seleksi) terhadap semua bahan-bahan informasi yang berdatangan dari berbagai penjuru arah sumber informasi yang ada di kantor redaksi, hal ini terjadi karena terbatasnya ruang. Di satu pihak, informasi yang datang berjumlah banyak, sedangkan di pihak lain ruang yang tersedia memuatnya terbatas (Luvleon, 2007).

Berita-berita yang disajikan media massa kepada pembacanya, merupakan berita yang telah diseleksi terlebih dahulu oleh penjaga gerbang (*gatekeeper*) di ruang redaksi. Sehingga, masyarakat pembaca media massa beranggapan bahwa apa yang diberitakan media massa merupakan peristiwa

penting di mata mereka. Menurut McQuail (1989: 163-166), beberapa faktor utama yang mempengaruhi suatu pilihan antara lain manusia (tokoh), lokasi dan waktu. Biasanya faktor-faktor tersebut membentuk suatu kombinasi.

5. Surat Kabar Harian

Surat kabar atau bisa disebut juga koran merupakan salah satu kekuatan sosial dan ekonomi yang cukup penting dalam masyarakat. Menjelang abad ke-20, dunia surat kabar telah mampu meraih kredibilitasnya yang lebih baik lewat pembentukan suatu organisasi profesional. Pada awal abad ini, pengaruh individu dalam pers mulai rontok dan berubah menjadi bentuk perusahaan yang semakin besar.

Secara bertahap pertumbuhan ini terjadi, hingga surat kabar pada akhirnya tumbuh membentuk *press association* yang cukup besar. Di sini kelangsungan pers ditunjang pula oleh kekuatan ekonomi yang terus berpacu mengikuti perkembangan zaman. Untuk perkembangan pada tahap berikutnya, pers mulai berupaya meningkatkan daya tariknya melalui proses spesifikasi masyarakat baca, penerbitan edisi khusus daerah tertentu dan pembagian rubrik atau kolom kolom yang menarik (Muchtadi, 1999: 90).

G. Konsep Operasional

Guna mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan analisis teks media dengan analisis *framing* ini, maka berdasarkan kerangka teoritis yang telah

dipaparkan dan permasalahannya, maka konsep operasional peneliti dapat dilakukan sebagai berikut.

Dalam riset media ini, model *framing* yang digunakan dalam membedah teks media untuk melihat kecenderungan pemberitaan oleh Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru ini adalah dengan menggunakan perangkat *framing* yang dikemukakan oleh Robert M Entman.

Adapun untuk mengetahui *framing* pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP yang menjadi sorotan media Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru, dapat diukur dengan pendekatan *framing* sebagai berikut.

1. Bagaimana peristiwa / isu dilihat? Sebagai masalah apa? Khususnya dalam konflik warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP.
2. Peristiwa itu disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah sehingga terjadi konflik warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP?
3. Nilai apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
4. Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/ isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah? Dalam hal ini solusi apa yang ditawarkan Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru.

H. Metode Penelitian

1. Subyek penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah media massa cetak yakni Surat Kabar Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru yang merupakan surat kabar daerah terkemuka dan sedang berkembang di Provinsi Riau dan sekitarnya. Kedua media ini saling berlomba untuk menarik perhatian pembacanya dengan penyajian berita-berita yang aktual dan penting yang harus diketahui masyarakat.

Sebagai media daerah, setiap isu atau masalah di wilayah Riau terus *discover* dan *diupdate* kedua media ini. Apalagi isu yang berdampak besar dan menimbulkan rasa ingin tahu semua pihak akan kebenaran suatu isu tersebut.

2. Obyek penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP dari edisi Rabu tanggal 1 Juni hingga Selasa 7 Juni 2011. Peneliti memilih berita pada edisi tersebut karena konflik warga Pulau Padang Kabupaten Meranti dengan PT RAPP terjadi pada Senin malam, 30 Mei 2011.

Pada Rabu, 1 Juni 2011 muncul berita secara *massif* di beberapa media harian lokal Riau terkait isu ini. Tiap media menyajikan beragam versi dari peristiwa konflik ini, termasuk Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru. Masalah

ini penting dan perlu diketahui publik secara berkelanjutan hingga tanggal 7 Juni 2011.

3. Teknik pengumpulan data

Data primer pada penelitian ini adalah dokumentasi berita konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP yang terbit selama rentang waktu 1 – 7 Juni 2011. Data diambil dari Kantor Redaksi Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru. Data sekunder atau pendukung penelitian ini adalah sejarah singkat kedua media dimana berita diteliti, serta sekilas peristiwa konflik warga Pulau Padang dengan PT RAPP.

Menurut Arikunto (2002: 107) teknik dokumentasi dalam pengumpulan data dimana dokumen atau catatan menjadi sumber data, sedangkan isi dokumen atau catatan menjadi subjek penelitian atau variabel penelitian. Pada tahap ini berita terkait penelitian dikumpulkan, diorganisir dalam bentuk tabel. Selain melihat judul dan isi berita yang ditampilkan, penulis juga mengamati posisi berita, sikap redaksional yang tercermin dari pemberitaan, narasumber yang dipilih dan ukuran berita yang ditampilkan.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan isi media massa yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis *framing* yang dikemukakan Robert Entman. Jadi data yang telah terkumpul disusun,

dikelompokkan dan diorganisasikan kemudian dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam perangkat Entman. (Kriyantono, 2006: 254).

Analisis isi kualitatif ini bersifat sistematis, analitis tapi tidak kaku seperti dalam analisis isi kuantitatif. Kategorisasi dipakai hanya sebagai *guide*, diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama proses riset. Saat ini telah banyak metode analisis yang berpijak dari pendekatan analisis isi kualitatif. Antara lain: analisis *framing*, analisis wacana, analisis tekstual, semiotik, analisis retorika, dan *ideological criticism*. Periset dalam melakukan analisis bersikap kritis terhadap realitas yang ada dalam teks yang dianalisis (Kriyantono, 2006: 248).

Pendekatan kritis tersebut dipengaruhi oleh pandangan Marxis yang melihat media bukanlah kesatuan yang netral, tetapi media dipandang sebagai alat kelompok yang dominan untuk memanipulasi dan mengukuhkan kekuasaan dengan memarginalkan kelompok yang tidak dominan. Pada dasarnya analisis isi kualitatif (kritis) memandang bahwa segala macam produksi pesan adalah teks, seperti berita, iklan, sinetron, lagu, dan simbol-simbol lainnya yang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan sang pembuat pesan. Berita, misalnya bukanlah realitas sebenarnya. Berita adalah realitas yang telah diseleksi dan disusun menurut pertimbangan-pertimbangan redaksi, istilahnya disebut “*second-hand reality*”. Artinya, ada faktor-faktor subjektivitas awak media dalam proses produksi berita. Karena itu, fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi awak media.

Isi media, misalnya menurut Brian McNair (1994: 39-58) dalam Kriyantono (2006: 249), dapat lebih ditentukan oleh:

1. Kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik (*the political-economy approach*).
2. Pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses produksi berita (*organizational approach*).
3. Gabungan berbagai faktor, baik internal media atau pun eksternal media (*culturalis approach*).

I. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan penelitian ini, penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan sejarah perkembangan Harian Riau Pos, sejarah berdirinya Harian Tribun Pekanbaru dan sekilas konflik Pulau Padang.

BAB III: PENYAJIAN DATA

Bab ini berisikan penyajian berita hasil temuan peneliti terkait konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru.

BAB IV: ANALISA DATA

Bab ini berisikan hasil analisa *framing* pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru beserta rangkuman hasil analisis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Perkembangan Riau Pos

Surat kabar harian pagi Riau Pos terbit untuk pertama kalinya pada 18 Januari 1991 di gedung percetakan milik Pemerintah Provinsi Riau di jalan Kuantan Raya Pekanbaru. Bermula edisi pertama, bertepatan dengan meletusnya perang teluk dengan sub judul “ George Bush Yakin Takkan Gagal, Saddam Janjikan Kemenangan”. Awal pertama kali terbitnya Riau Pos dengan delapan halaman.

Harian Pagi Riau Pos dipimpin oleh Rida K Liamsi dengan dibantu oleh Dahlan Iskan. Pada cetakan pertama mereka sangat bangga karena cetakan pertama kalinya tersebut berhasil dengan bagus. Terbukti langsung dapat masuk kepasar dengan resmi. Bahkan dipagi itu pula mereka bertekad untuk menerbitkan Riau Pos setiap harinya. Dengan artian bahwa bagaimana Riau Pos mampu untuk terbit setiap hari dan berkelanjutan dengan oplah yang memadai untuk hidup dan bertahan. Sehingga terbukti hari ini Riau Pos mampu untuk hidup bertahan dan berkembang, sehingga menjadi koran yang terbesar se-sumatera.

Sebagai koran terbesar di Sumatera, yang menjadi slogan Riau Pos saat ini, itu juga tidak mudah. Lika liku perjalanan panjang juga dilaluinya. Sebelum Riau Pos terbit sebagai surat kabar harian, Riau Pos adalah surat kabar yang bernama Warta Karya. Surat kabar yang terbit satu minggu sekali. Pertama kali

terbit pada tahun 1989, sekitar dua tahun sebelum Riau Pos terbit. Penerbitnya pada waktu itu adalah Yayasan Munandar, yang diketuai oleh H Imam Munandar. Namun beberapa bulan kemudian Surat Kabar Mingguan Warta Karya berhenti penerbitannya yang dikarenakan beberapa hal.

Pada akhirnya tahun 1991, Surat Kabar Warta Karya diganti dengan nama Riau Pos, yang kedengarannya lebih komersial, demikian pula pengasuhnya diganti. Dalam tempo singkat SIUPP-nya keluar, dan Riau Pos segera diterbitkan. Sejumlah tenaga pendukung yang baru antara lain; H. Busra Al Gereaa, (wartawan Haluan di Pekanbaru), Mafiron (koresponden Pelita di Riau), serta Armawi KH, seorang seniman yang menangani perwajahan. Dan berkantor di Jalan Kuantan Raya 101, tidak lama kemudian kantor Riau Pos pindah di Jalan Imam Bonjol. Namun nasibnya juga kurang baik. Hanya beberapa edisi, Riau Pos kembali macet dan berhenti terbit.

Dalam kondisi yang sangat sulit, karena harus masih membayar sejumlah karyawan yang ada, sementara surat kabarnya sendiri terbit secara tersendat-sendat, maka datanglah tawaran kerjasama dari kelompok penerbitan Jawa Pos. yang bepusat di Surabaya. Tawaran manajemen ini sebelumnya pernah juga datang dari kelompok lain yaitu pengusaha yang berpusat di Medan yang tergabung dalam kelompok usaha inti rayon. Namun rencana kerja sama dengan kelompok tersebut tidak terealisasi, karena ada beberapa kesepakatan dinilai tidak cocok. Disamping itu juga, kelompok ini dinilai tidak punya pengalaman dalam penerbitan pers.

Maka penawaran dari Jawa Pos dinilai lebih sesuai, dan memungkinkan Riau Pos dapat kembali eksis sebagai media pers daerah. Sehingga pada 1 juni 1990 sebuah MoU (*memorandum of understanding*) yang ditandatangani di depan notaris Syawal Sutan. Dari kesepakatan tersebut Riau Pos kembali terbit di Bumi Lancang Kuning ini.

Kekuatan utama dari manajemen Riau Pos sejak awal adalah kebersamaan dan kerja keras. Semangat yang ditopang oleh kehandalan jaringan Jawa Pos media grup memberi peluang agar Riau Pos dapat tumbuh dan berkembang melalui prinsip-prinsip tumbuh bersama, kebersamaan anak perusahaan lainnya dalam kebersamaan, yang pada akhirnya memang memberikan aset yang mengembirakan.

Slogan yang dikibarkan Riau Pos, pada waktu itu adalah Riau Pos koran nasional dari Riau. Artinya Riau Pos ingin menjadi koran yang sebanding dan sama majunya dengan koran nasional lainnya yang ada di tanah air, baik dalam kualitas isinya maupun dalam tampilan dan gerakannya.

Menurut tekad pendiri Riau Pos pada waktu itu, Rida K Liamsi serta dibantu oleh Dahlan Iskan sebagai penanggung jawab, bahwa Riau Pos tidak hanya ingin tampil menjadi sebuah media, namun menjadi sebuah kekuatan, lokomotif, institusi, serta bisnis pers. Ini semua mampu diwujudkan Riau Pos atas tekad kerja sama tim atau karyawan Riau Pos pada waktu itu.

Perkembangan perusahaan media pagi Riau Pos, juga dapat dilihat dari oplahnya yang terus bergerak maju. Riau Pos terbit pertama kali dimulai dengan

oplah 2500 eksemplar, kemudian merangkak menjadi 7500 eks. Pada tahun kedua 12500 eks, kemudian 18500 eks ditahun keempat. Pada tahun kelima oplah Riau Pos sudah melewati 20000 eks.

Dengan semangat yang tinggi dan penuh kebersamaan Riau Pos pada tahun keenam sudah menembus 25000 eks. Sedangkan pada tahun ketujuh (1998), sempat menembus 50000 eks. Yaitu pada hari lengsernya Presiden Suharto dan oplah itu bertahan hingga lebih sepuluh hari, walaupun kemudian turun pada tahun-tahun berikutnya. Sehingga sampai sekarang Riau Pos kukuh dibazar dengan oplah diatas 35000eks.

Selain dari tingkat oplah yang semakin maju selama kurun waktu enam hingga tujuh tahun, juga dapat dilihat dari penyebarannya yang semakin meluas. Pada tahun pertama Riau Pos hanya berkonsentrasi di Pekanbaru dan sekitarnya. Sedangkan pada tahun keempat Riau Pos mulai didistribusikan ke berbagai daerah di Riau. Seperti di Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir (inhil), Indragiri Hulu (inhu), Tanjung Pinang, Dumai dan Batam.

Dari rangkaian di atas yang terpenting adalah keberhasilan Riau Pos, yang mempertahankan keberadaan sebagai surat kabar daerah yang terus terbit dan tidak pernah absen mengunjungi pembaca setianya. Kecuali hari libur nasional. Artinya dengan terbit kontiniu dari tahun ketahun sampai tahun kelimabelas, maka Riau Pos sudah berhasil menembus mitos yang dulunya mengatakan bahwa di Riau tidak pernah ada koran yang bisa berumur panjang. Dan menuding orang-orang pers di Riau tidak mampu mengelola surat kabar secara baik dan

profesional, meskipun Riau daerah yang kaya raya dan rakyatnya cukup mampu. Keberhasilan ini dirayakan sebagai tahun yang penuh sejarah, tahun menembus mitos.

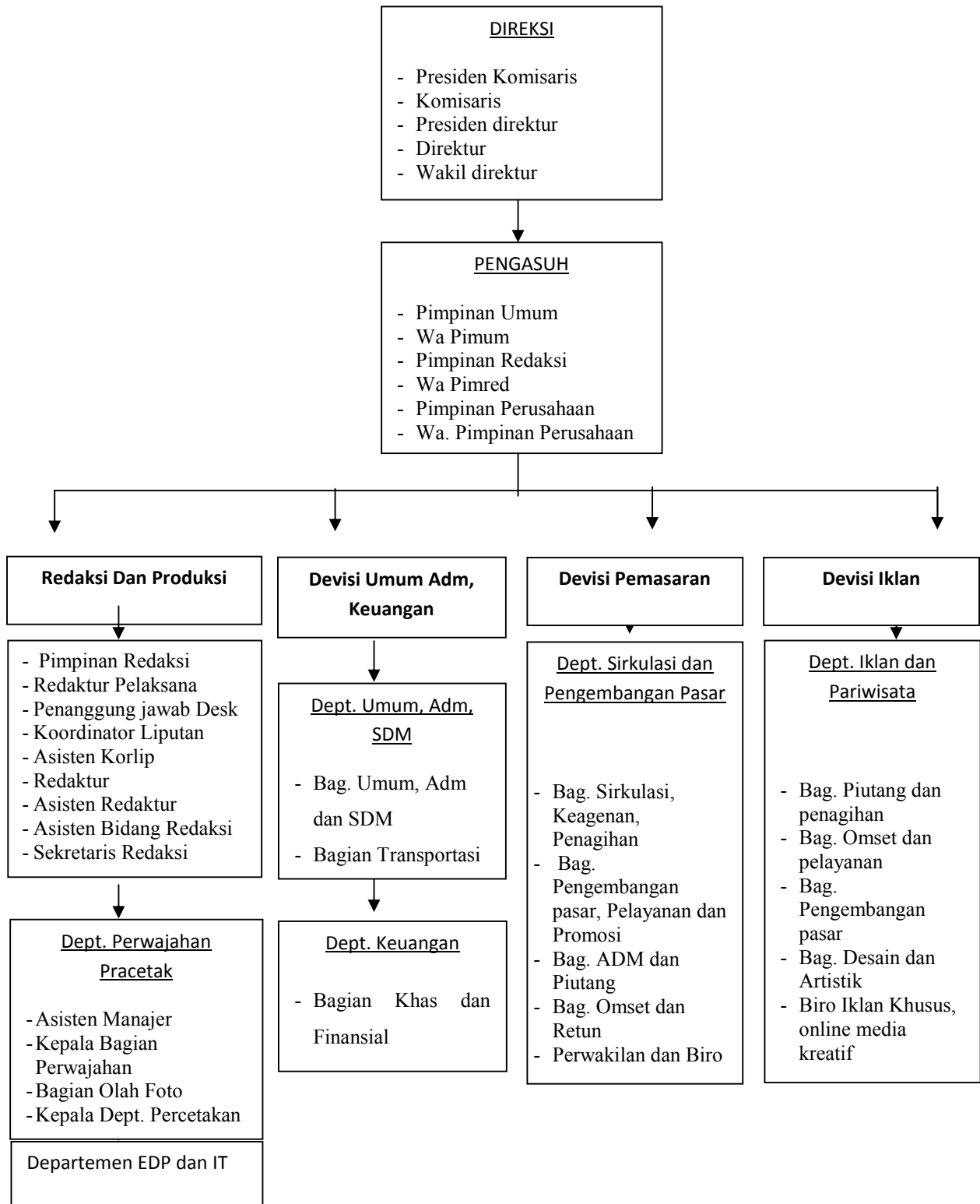
Rentetan kerja selama delapan tahun (1991-1998), ternyata juga menumbuhkan tekad, agar Riau Pos tidak berhenti hanya sebuah institusi penerbitan, institusi idealism. Peluang-peluang yang muncul di era informasi yang tetap memberi inspirasi bagi manajemen Riau Pos dan Jawa Pos media grup melakukan pengembangan media usaha. Bagi Riau Pos kesempatan tersebut menjadi pendorong bagi dirinya untuk segera menjadi sebuah grup.

Setelah sekian tahun Riau Pos berdiri maka pada 5 Maret 1997 gedung Riau Pos diresmikan oleh Gubernur Riau Suroto dan Dahlan. Pada tahun 1998 Riau Pos mengembangkan percetakan menjadi tiga buah surat kabar harian yang terbit langsung di Riau. Yaitu Riau Pos untuk daratan Sumatra untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta Utusan (Pekanbaru Pos sekarang ini).

Tidak hanya itu pada tahun berikutnya hingga Riau Pos mengembangkan sayapnya untuk koran daerah yang diberi nama Dumai Pos yang sekarang terbit di Dumai. Selain itu, berdasarkan klasifikasi isi koran, pada tahun 2003 Riau Pos juga membuka koran kusus kriminal yang diberi nama Pekanbaru MX.

Selain mengembangkan sayap di wilayah Riau, pada 1998 Riau Pos juga mengembangkan sayap ke wilayah Sumatera Barat (Sumbar), dengan menerbitkan Padang Ekpress. Sedangkan di wilayah Sumatera Utara, juga diterbitkan Medan Ekpress.

STRUKTUR ORGANISASI PT. RIAU POS INTERMEDIA PEKANBARU



Sumber: Dokumentasi Riau Pos 2011

B. Sejarah Berdirinya Harian Tribun Pekanbaru

Harian Tribun Pekanbaru adalah surat kabar yang baru muncul di Riau. Koran ini berusia lebih kurang dua setengah tahun. Berdiri pada tanggal 18 April 2007, dengan moto Spirit Baru Riau sebagai media harian yang independen dan kredibel. Koran ini berdiri setelah Tribun Batam sukses mendapat tempat di hati pembaca. Tidak lama setelah Tribun Batam sukses, Kompas Gramedia Group melalui Pers Daerahnya (Persda) terus melebarkan sayapnya. Dua tahun setelah itu berdiri Tribun Pekanbaru di Bumi Lancang Kuning ini.

Persda merupakan anak dari Kompas Gramedia yang bergerak di bidang industri percetakan. Koran Kompas sebagai induk dari koran-koran daerah, tidak dapat langsung bersaing dengan koran-koran daerah, alasan tersebut membuat Persda melahirkan koran-koran daerah.

Saat ini surat kabar daerah yang sudah dilahirkan oleh Persda mencapai 16 surat kabar, sebagian dari provinsi di Indonesia. Persda akan terus melahirkan koran-koran daerah hingga mewakili setiap provinsi yang ada di Indonesia. Koran-koran tersebut antara lain: Tribun Pontianak, Tribun Batam, Tribun Jabar, Tribun Kaltim, Tribun Timur, Pos Kupang, Serambi Indonesia, Prohaba, Sriwijaya Pos, Bangka Pos, Pos Belitung, Banjarmasin Pos, Metro Banjar, dan Tribun Pekanbaru yang beralamat di Jalan Haji Imam Munandar No. 383 Bukit Raya, Pekanbaru Riau 28281. Tlp (0761) 36345 Fax: (0761) 32786 email: tribun_pekanbaru@yahoo.co.id. Online: www.tribunpekanbaru.com. Ditambah

Tribun Lampung yang diluncurkan pada bulan Juni lalu dan si bungsu Tribun Jambi baru berusia tiga bulan.

Tribun Pekanbaru selalu menampilkan Perkembangan berita terbaru ke publik, tidak ada pengkhususan terhadap pemerintah maupun pelaku bisnis. Semuanya sama tidak ada istilah tunduk takut, selagi menyangkut kepentingan publik, Tribun selalu menyorot hal tersebut tanpa menutup-nutupi.

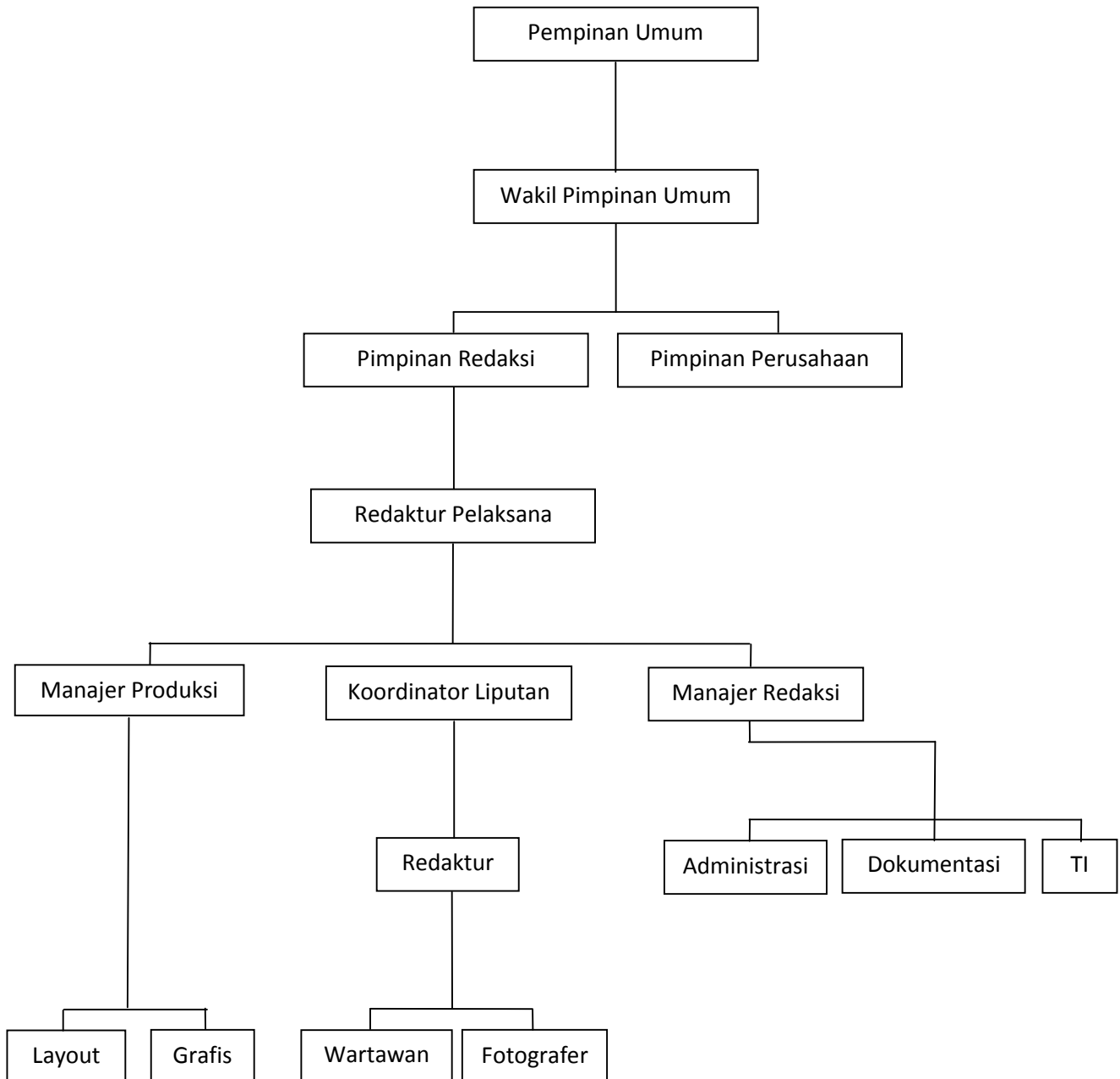
Belum genap tiga tahun, Tribun Pekanbaru sudah mampu menyaingi pendahulunya, seperti Riau Pos dan Riau Mandiri termasuk koran-koran lain yang ada di Riau. Perkembangan oplahnya terus meningkat dibanding koran-koran lain di Riau. Hal ini dapat dilihat dari persentase perbandingan Tribun Pekanbaru mencapai 34% dari sembilan koran yang ada di Riau (sumber agen koran). Dalam perkembangan oplahnya mulai dari terbit hingga saat ini, sudah mencapai 45.000 eksemplar perhari sebanyak 24 halaman. Terdiri dari tiga bagian, Tribun Pekanbaru sebagai *headline* sebanyak delapan halaman, Pekan *Life* sebanyak delapan halaman, bagian tiga *Super Ball* sebanyak delapan halaman, dengan jumlah halaman berwarna 10 halaman dan halaman hitam putih 14 halaman. Dalam percetakan Harian Tribun Pekanbaru sudah melakukan pergantian mesin cetak. Pada awalnya menggunakan mesin cetak dengan kapasitas cetakan 12.000 eksemplar per jam, dengan oplah yang terus meningkat, mesin tersebut diganti karena tidak mampu lagi menampung kapasitas yang lebih banyak. Saat ini mesin cetak di Tribun Pekanbaru memiliki kecepatan cetakan 25.000 per jam.

Pembaca Harian Tribun Pekanbaru sudah tersebar hampir di seluruh daerah di Riau. Tribun Pekanbaru sebagai koran keluarga dengan persentase pembaca pria 60% dan wanita 40% yang beredar antara lain: Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Siak, Duri, Dumai, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, dan Meranti (Sumber Litbang Tribun Pekanbaru).

Adapun visi Harian Tribun Pekanbaru sebagai media baru yang memberikan warna terhadap industri pers di Riau, Tribun mencoba mempromosikan dirinya sebagai koran intelektual independen dan kredibel, tidak terikat dengan pemerintahan, berusaha memberikan gambaran-gambaran, anjuran-anjuran serta peringatan kepada khalayak tentang sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kebudayaan (wawancara dengan Manajer Redaksi Tribun, Candra Dani).

Segmen pasar Harian Tribun Pekanbaru adalah kalangan menengah ke atas. Di antaranya, kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, para politisi, ormas, pemberi kebijakan-kebijakan, ekonom, publik figur, tokoh-tokoh dan lain-lain. Gaya penulisan dengan mengedepankan unsur *human interest* yaitu peristiwa yang menyentuh hati manusia, atau lebih disebut sebagai konsep *mikro people*. Selain memenuhi unsur 5W + 1H, Tribun Pekanbaru juga menceritakan suatu persoalan itu terjadi, bagaimana prosesnya, karena dari media lain orang sudah tahu peristiwa yang terjadi. Maka di sinilah terlihat perbedaan Tribun Pekanbaru dengan koran lain.

Struktur Organisasi Keredaksian Harian Tribun Pekanbaru



Struktur Organisasi

Pemimpin Umum	: H. Herman Darmo
Wakil Pemimpin Umum	: H. Sjamsul Kahar
Pemimpin Redaksi	: RHR Dodi Sarjana
Redaktur Pelaksana	: Abdul Haerah
Pemimpin Perusahaan	: Rosa Dharmasari
Manager Produksi	: Alhafis Yasir
Manager Redaksi	: Candra Dani
Koordinator Liputan	: Harismanto
Staf Redaksi	: Rinaldi, Alfirdaus, M Hansardi, Zulharman, Naning, Kasri, Anastasia Dwi Indrastuti, Raya Nainggolan, Rahmadi, Ema Damayanti, Junaidi, Hengki Seprihadi, Ihsanul Hadi, Ariestia, Sesri Engla Sespita, Syafruddin Mirohi, Zul Indra, Moh Iqbal, Sugiri, Youngster, Theo Rizki, Melvinas Priananda, Dodi Vladimir.

Profil Harian Tribun Pekanbaru

Nama Surat Kabar	: Tribun Pekanbaru
Percetakan	: Kompas Gramedia
Penerbit	: PT. Riau Media Grafika
Alamat Redaksi	: Jl. Harapan Raya / H. Imam Munandar No. 383 Bukit Raya, Pekanbaru (0761) 36345 E-Mail : tribun_ pekanbaru@Yahoo.co.id
Visi	: Mencerdaskan Masyarakat
Motto	: Spirit Baru Riau
Skala Terbit	: Harian
Jumlah Halaman	: 24 Halaman
Ukuran Kertas	: 650 x 380 MM
Deadline	: 17.30 Wib
Harga	: Rp. 3000,-
Jumlah Oplah	: 45.000 eksemplar
Wilayah Edar	: Pekanbaru, Kampar, Rokan Hulu, Dumai, Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak Sri Indrapura, Kuantan Singingi, dan Meranti.

C. Sekilas Konflik Pulau Padang

Pulau Padang termasuk salah satu pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, dengan dasar hukum yakni Undang-undang Nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. (Wikipedia: 2012).

Melalui SK Menhut Nomor 327 Tahun 2009, sebagaimana diberitakan berbagai media, PT RAPP diberi izin untuk membuka kebun Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas lebih kurang 43.000 hektar. Konsesi yang diberikan mencakup luas sekitar 40 persen dari 101.000 hektar luas Pulau Padang, sebuah pulau yang terletak di bibir Selat Melaka. (drh Chaidir: 2012).

Konflik berkepanjangan di Pulau Padang yang meliputi 14 desa dipicu oleh keluarnya izin perusahaan HTI PT RAPP tanggal 21 Juni 2009 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.327/Menhut-II/2009 seluas 350.165 hektar, dimana yang masuk di Pulau Padang seluas 41.205 hektar.

Konsesi PT RAPP di Pulau Padang ini sebagian besar tumpang tindih dengan tanah-tanah yang sudah menjadi hak masyarakat lokal, baik berupa perkebunan karet, sagu, maupun areal perladangan dan eks perladangan dan perkebunan. Karena PT RAPP memaksakan beroperasi tanpa mendengarkan keberatan masyarakat sehingga penolakan besaran-besaran masyarakat melalui demonstrasi sering kali terjadi, bahkan hingga ke Jakarta.

Bermula dari PT RAPP memaksa memasukkan alat berat pada Mei lalu di Tanjung Padang. Masyarakat yang tergabung dalam Serikat Tani Riau berupaya menghambat agar alat berat berhenti bekerja dan sebelum ada penyelesaian yang dapat diterima masyarakat. Tepatnya tanggal 30 Mei dari pagi hingga sore (05.30 WIB) masyarakat demonstrasi menghambat operasi alat berat di lokasi pelabuhan yang sedang dibangun PT RAPP di desa Pulau Padang. Pelabuhan ini adalah akses utama PT RAPP untuk masuk memulai penebangan hutan alam di tengah pulau dan mengeluarkan kayu *log* dan *chip* untuk kemudian dibawa ke Pelabuhan Futong di Sungai Apit Kabupaten Siak dan diteruskan ke pabrik bubur dan kertas PT RAPP di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Aksi penolakan RAPP ini berakhir dengan tertib pada pukul 17.00. Sebelumnya, diungkapkan oleh Sutarno, ada beberapa anggota STR yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam. “Tapi orang-orang yang membawa senjata tajam mau meninggalkan senjatanya dan melakukan aksi dengan damai. Mereka masih menghargai organisasi walaupun emosi sudah meninggi,” lanjut dia.

Usai aksi besar-besaran ini Sutarno menegaskan, STR sebagai organisasi akan lepas tangan jika sewaktu-waktu masyarakat Pulau Padang bertindak sendiri. “Satu tahun belakangan kami sudah melakukan aksi sebanyak enam kali. Termasuk ke Jakarta beberapa waktu lalu,” katanya. (Tribun Pekanbaru, 1 Juni 2011)

Tengah malam pada hari yang sama terjadi peristiwa pembakaran dua alat berat di lokasi dimana demonstrasi dilakukan oleh sekelompok orang tak dikenal. (Riduan: 2011)

Dari pantauan *Riau Pos* saat turun ke lokasi pembakaran kemarin, satu unit mess pekerja yang berada di lokasi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah. Bukan hanya itu, mess lainnya dari tiga unit mess yang dibangun menghitam dan atapnya yang terbuat dari daun rumbia hilang dijilat api.

Kejadian tersebut dilakukan oleh sekitar 200 orang yang datang dari arah lokasi *camp* itu. Melihat massa bersenjatakan parang, tombak dan lainnya, termasuk membawa bahan bakar bensin (premium), *security* yang bertugas di lokasi langsung mengevakuasi diri melalui jalur laut.

“Kami bertugas di sini hanya 30 orang. Melihat massa yang datang dari arah darat lebih kurang 200 orang, kami langsung mengevakuasi diri. Sangat konyol jika kita mencoba menghentikan mereka. Selain jumlahnya yang banyak, massa yang datang menggunakan senjata tajam,” ungkap Kepala *Security* RAPP di *camp* tersebut, Eko kepada *Riau Pos*.

Aksi yang dilakukan oleh massa yang belum diketahui berasal darimana, dilakukan sekitar pukul 22.30 WIB sampai pukul 00.30 WIB. “Melihat mereka langsung menghunuskan senjata tajam dan melakukan aksi pembakaran, dengan *speed boat* perusahaan, kami langsung pergi ke Desa Ketam Putih. Sampai

akhirnya pembakaran itu menghanguskan *camp*, sekitar pukul 00.30 WIB kami kembali ke lokasi dan massa yang anarkis tadi telah pergi,” sebut anggota *security* yang bertugas menjaga di lokasi saat kejadian, Surya (Riau Pos, 1 Juni 2011).

Sekretaris Jenderal STR, Desri Kurniwati menduga kemungkinan dalang aksi pembakaran tersebut adalah orang-orang yang pro dengan RAPP. “Yang menginginkan perusahaan tersebut terus beroperasi,” tegasnya. Ia mengindikasikan itu sebagai upaya untuk mengambinghitamkan STR dalam kasus ini. Alasannya karena selama ini STR yang selalu menentang keberadaan RAPP. Dengan adanya kasus ini, tentu saja aparat akan mempunyai alasan untuk menangkap para pemimpin STR di lapangan.

Ia menambahkan, dari kejadian tersebut, Pulau Padang saat ini terisolir. Hal itu karena Pelabuhan Buton dan Pelabuhan Kurau ditutup oleh Polres Bengkalis untuk mencegah warga keluar dari pulau tersebut. “Kalau hal ini tidak segera diselesaikan, maka masyarakat yang akan menanggung kesengsaraan,” ujarnya.

Selain itu, Desri juga menyesalkan keputusan RAPP yang baru menghentikan aktifitasnya sementara ketika sudah ada insiden. Dari awal, seharusnya RAPP dan institusi yang terkait menyadari potensi konflik yang timbul karena keberadaan konsesi lahan itu.

Hal senada diungkapkan ketua STR Kepulauan Meranti, Muhammad Riduan. Ia menegaskan aksi pembakaran itu bukan tanggungjawab STR. Karena pada waktu pembakaran terjadi, seluruh anggota STR sudah meninggalkan lokasi demonstrasi (Tribun Pekanbaru, 2 Juni 2011).

BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Pengantar

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni tentang *framing* berita konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru, peneliti menyajikan data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan isi media massa yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

Metode analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa (Kriyantono, 2006: 251).

Menurut G.J Adjondro (dalam Sobur, 2002: 165) *framing* merupakan metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak dingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya. Jadi analisis *framing* ini merupakan analisis untuk mengkaji pembingkai realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lain-lain) yang dilakukan media. Framing digunakan media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak. (dalam Kriyantono, 2006: 252).

Berdasarkan dokumentasi redaksi Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru edisi 1 – 7 Juni 2011, berikut daftar berita yang peneliti temukan dan akan dianalisis terkait konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP yang dimuat dua koran tersebut. Berita ini dikelompokkan sesuai media, judul berita, kelengkapan berita dan posisi berita.

Tabel III.1
Daftar berita konflik warga Pulau Padang
Kabupaten Kepulauan Meranti
dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru

No.	Hari / Tanggal	Media	Judul Berita	Kelengkapan berita	Posisi
1.	Rabu, 1 Juni 2011	<i>Riau Pos</i>	<i>Camp RAPP Dibakar Massa</i>	teks berita, foto berita, kronologis kejadian	<i>headline</i> rubrik PRO – OTONOMI, halaman 23
2.	Kamis, 2 Juni 2011	<i>Riau Pos</i>	KNPI Meranti Kecam Aksi di Pulau Padang	teks berita	berita kolom pada rubrik PRO – KEPULAUAN MERANTI, halaman 24
3.	Kamis, 2 Juni 2011	<i>Riau Pos</i>	Kasus Pembakaran Kamp Harus Ditangani Persuasif	teks berita	berita pendek pada rubrik PRO – KEPULAUAN MERANTI, halaman 24
4.	Rabu, 1 Juni 2011	<i>Tribun Pekanbaru</i>	Bentangkan Baliho Komnas HAM	teks berita	<i>Subordinate headline</i> pada rubrik Riau Region, halaman 3
5.	Kamis, 2 Juni 2011	<i>Tribun Pekanbaru</i>	Ada Indikasi Salahkan STR	teks berita	<i>Subordinate headline</i> pada rubrik Riau Region, halaman 3
6.	Jumat, 3 Juni 2011	<i>Tribun Pekanbaru</i>	Rekomendasi Komnas Diabaikan	teks berita	<i>Headline</i> pada rubrik Riau Region, halaman 3

Sumber: dokumentasi Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru

Pasca konflik pada Senin malam, 30 Mei 2011, Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru memuat berita terkait konflik. Masing-masing media memuat tiga berita pada rentang waktu Rabu, 1 Juni 2011 hingga Jumat, 3 Juni 2011.

Harian Riau Pos memuat berita terkait peristiwa tersebut pada edisi Rabu, 1 Juni 2011 dengan judul “Camp RAPP Dibakar Massa”. Berita ini menempati posisi headline rubrik Pro-Otonomi halaman 23 dengan memuat teks berita berikut foto dan kronologis peristiwa. Sebagian besar berita berisikan kronologis kejadian konflik dengan memuat komentar pihak keamanan PT RAPP selaku narasumber utama berita. Selain itu juga dimuat komentar pihak kepolisian dan perusahaan.

Sehari setelahnya yakni pada Kamis, 2 Juni 2011, Harian Riau Pos memuat dua berita sekaligus terkait konflik. Judul berita tersebut adalah “KNPI Meranti Kecam Aksi di Pulau Padang” dan “Kasus Pembakaran Kamp Harus Ditangani Persuasif”. Dua berita ini dimuat Harian Riau Pos pada halaman 24 rubrik Pro-Kepulauan Meranti dengan hanya memuat teks berita. Berita pertama berisikan komentar Asyari, Ketua KNPI Kabupaten Kepulauan Meranti terkait aksi warga dimana menurutnya aksi itu merugikan semua pihak bahkan pemerintah kabupaten. Berita kedua memuat harapan Hafizan Abas, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyelesaian kasus konflik agar ditangani secara persuasif oleh pihak kepolisian.

Harian Tribun Pekanbaru, turut memberitakan konflik warga ini. Pada Rabu, 1 Juni 2011, berita dengan judul “Bentangkan Baliho Komnas HAM” menempati halaman 3 rubrik Riau Region dengan memuat teks berita. Sebagian besar berita

menyampaikan informasi terkait aksi warga pada Senin siang, 30 Mei 2011. Berita tersebut menekankan aksi ini adalah bentuk kekecewaan warga terhadap PT RAPP selaku perusahaan yang mengabaikan rekomendasi Komnas HAM sebulan sebelum aksi dilakukan.

Berita kedua pada Kamis, 2 Juni 2011 dengan judul “Ada Indikasi Salahkan STR” dimuat pada rubrik Riau Region halaman 3 dengan hanya menampilkan teks berita. Isinya dengan jelas menyampaikan siaran pers Serikat Tani Riau (STR) yang menolak dikait-kaitkan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas aksi pembakaran dan perusakan aset perusahaan di lokasi konflik. Pada berita ketiga, Harian Tribun Pekanbaru memberi judul “Rekomendasi Komnas Diabaikan” dimuat pada rubrik Riau Region dengan posisi headline halaman 3. Berita ini memuat komentar pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mengenai insiden warga dan perusahaan yang terjadi disebabkan masalah izin yang diberikan. Menurut Walhi seharusnya kebijakan ini ditinjau ulang karena merugikan dan dapat merusak lingkungan.

B. *Framing* Berita Konflik Warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP

Guna mengetahui lebih lanjut *framing* berita konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru, berikut isi lengkap berita terkait penelitian ini:

1. *Riau Pos* edisi Rabu 1 Juni 2011

***Camp* RAPP Dibakar Massa**

Kapolres: Ini Tindakan Pidana

CAMP PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (30/5) malam dibakar massa. Dua eskavator dari empat yang berada di sana hangus terbakar, dua lainnya dirusak.

Dari pantauan *Riau Pos* saat turun ke lokasi pembakaran kemarin, satu unit mess pekerja yang berada di lokasi rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah. Bukan hanya itu, mess lainnya dari tiga unit mess yang dibangun menghitam dan atapnya yang terbuat dari daun rumbia hilang dijilat api.

Kejadian tersebut dilakukan oleh sekitar 200 orang yang datang dari arah lokasi *camp* itu. Melihat massa bersenjatakan parang, tombak dan lainnya, termasuk membawa bahan bakar bensin (premium), *security* yang bertugas di lokasi langsung mengevakuasi diri melalui jalur laut.

“Kami bertugas di sini hanya 30 orang. Melihat massa yang datang dari arah darat lebih kurang 200 orang, kami langsung mengevakuasi diri. Sangat konyol jika kita mencoba menghentikan mereka. Selain jumlahnya yang banyak, massa yang datang menggunakan senjata tajam,” ungkap Kepala *Security* RAPP di *camp* tersebut, Eko kepada *Riau Pos*.

Aksi yang dilakukan oleh massa yang belum diketahui berasal darimana, dilakukan sekitar pukul 22.30 WIB sampai pukul 00.30 WIB. “Melihat mereka langsung menghunuskan senjata tajam dan melakukan aksi pembakaran, dengan *speed boat* perusahaan, kami langsung pergi ke Desa Ketam Putih. Sampai akhirnya pembakaran itu menghanguskan *camp*, sekitar pukul 00.30 WIB kami kembali ke lokasi dan massa yang anarkis tadi telah pergi,” sebut anggota *security* yang bertugas menjaga di lokasi saat kejadian, Surya.

Mendapat kabar *camp* RAPP tersebut hangus terbakar, Polres Bengkalis bersama Polsek Merbau langsung turun ke lokasi kejadian. “Kami dapat kabar massa membakar eskavator dan *camp*. Massa juga masih di lapangan melakukan tindak anarkis. Namun kami hanya memantau dari laut,” ujar Kasat Intel, AKP Yudi Falmi kepada *Riau Pos*, Selasa (30/5) siang saat ditemui di lokasi bersama Kapolsek Merbau, AKP Syawaluddin Pane.

Kapolres Bengkalis, AKBP Ahmad Kartiko yang juga langsung turun ke lokasi *camp* RAPP yang terbakar itu, Selasa (31/5) menyebutkan kepada *Riau Pos*, pihak Polres Bengkalis telah membentuk tim olah TKP untuk mengusut kasus anarkis ini. Ini adalah tindakan pidana,” kata AKBP Ahmad Kartiko.

Ditambahkan Kapolres Bengkalis itu, pihaknya akan mengumpulkan barang bukti dan melakukan penyelidikan. Termasuk meminta keterangan dari para *security* yang bertugas di lokasi. “Sejalan dengan mengumpulkan alat bukti, kita akan berusaha mengejar pelaku yang melakukan aksi anarkis ini. Memang

tidak ada target waktu kapan bisa selesai mengusut kasus ini sampai tuntas, namun kita akan berusaha mengupayakan secepatnya,” ucap Ahmad Kartiko.

Dengan kejadian tersebut, PT RAPP mengalami kerugian miliaran rupiah. Diketahui *camp* RAPP di Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Kecamatan Merbau yang hangus terbakar tersebut yakni untuk membuat *jetty*.

Dikonfirmasi terpisah Salomo Sitohang, Asisten Manajer Hubungan Media PT RAPP mengatakan, aksi pengrusakan dan pembakaran di wilayah operasional PT RAPP di Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Senin (30/5) malam telah menyebabkan terbakarnya dua unit eskavator dan dua *camp* karyawan serta merusak aset-aset perusahaan lainnya di lokasi tersebut.

Akibat kejadian ini dan guna mengantisipasi terjadinya ancaman kerusakan dan bahaya lainnya, Manajemen PT RAPP memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan *jetty* dan jalan koridor di Dusun Sungai Hiu.

“PT RAPP secara resmi telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Bengkalis untuk dapat segera dilakukan penyelidikan atas peristiwa yang telah mengakibatkan kerugian signifikan bagi perusahaan serta menimbulkan trauma kepada karyawan dan kontraktor serta masyarakat. PT RAPP menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan bertindak cepat agar masalah ini tidak terulang di masa yang akan datang,” ujar Salomo.

Salomo menambahkan, sebagai perusahaan yang telah mendapatkan izin dari pemerintah di dalam hal ini, Menteri Kehutanan RI untuk berinvestasi di Pulau Padang, PT RAPP senantiasa berupaya untuk menaati hukum dan peraturan yang berlaku serta berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat setempat demi kelancaran operasional. “Komitmen PT RAPP di Pulau Padang ditekankan pada pengelolaan hutan secara lestari dan bertanggung jawab dan program-program pemberdayaan masyarakat yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujar dia.

Dikonfirmasi terpisah Ketua STR Kepulauan Meranti, Ridwan saat ditanyai soal anarkis yang terjadi kemarin, Selasa (30/5) via seluler, tidak menjawab, karena selulernya tidak aktif. Namun saat dikonfirmasi kepada sekretarisnya, Sutarno, pihaknya mengaku tidak tahu menahu. Kendatipun begitu dia tidak menampik terhadap tuduhan berbagai kalangan kepada STR.

“Jalan anarkis yang diambil oleh sekelompok massa ini bukan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kenapa harus diambil dengan jalan seperti ini. Jika ada perbedaan terhadap pandangan masuknya HTI ke Meranti, tentunya bisa dimusyawarahkan,” ujar Rubi Handoko yang akrab dipanggil Akok kepada *Riau Pos*, Selasa (31/5) di lapangan. (rnl)

Kronologis Pembakaran *Camp* RAPP di Pulau Padang Kepulauan Meranti

1. Pukul 15.00-17.00 WIB, massa Serikat Tani Riau (STR) menggelar aksi demonstrasi di *Camp* RAPP di Dusun Sungai Hiu Desa Tanjung Padang Kecamatan Merbau.
2. Sekitar pukul 23.00 WIB, dari arah barat pelabuhan *jetty* muncul sekitar 200 orang membawa senjata tajam, parang, tombak, melihat itu, petugas *security* RAPP lari ke arah laut untuk naik *speed* menuju Desa Ketam Putih.
3. Dalam aksi tersebut, jajaran Polsek Merbau dan Polres Bengkalis melakukan mediasi kedua belah pihak. Karena tidak ada solusi massa membubarkan diri.
4. Sekitar pukul 23.00 WIB Kasat Intel dapat laporan ada aksi massa dan melihat kobaran api dari tepi laut. Sampai akhirnya massa menghilang.
5. Pagi harinya dilaporkan dua eskavator dibakar hangus, dua lainnya rusak, kaca pecah, mess rata dengan tanah dan satu mess lainnya atapnya habis dibakar.
6. Olah TKP kepolisian, hanya ditemukan botol bensin, gulungan daun kelapa yang digunakan untuk untuk membakar disekitar alat berat.

Berita ini cukup lengkap. Selain teks berita, *Riau Pos* memperkuatnya dengan menampilkan foto terkait pembakaran serta kronologis peristiwa tersebut. Wartawan *Riau Pos* mewawancarai Eko, Kepala *Security* RAPP; AKP Yudi Fahmi, Kasat Intel; AKP Syawaludin Pane, Kapolsek Merbau; AKBP Ahmad Kartiko, Kapolres Bengkalis; Salomo Sitohang, Asisten Manajer Hubungan Media RAPP; Muhammad Riduan, Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti; Sutarno, Sekretaris STR Kabupaten Kepulauan Meranti; Ruby Handoko, Ketua Komisi II DPRD.

2. *Riau Pos*, edisi Kamis 2 Juni 2011

KNPI Meranti Kecam Aksi di Pulau Padang

SELATPANJANG (RP) – Pasca aksi pembakaran yang dilakukan sekelompok massa terhadap kamp RAPP di Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Kecamatan Merbau, Selasa (31/5) lalu, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Meranti menilai aksi yang dilakukan itu dapat merusak iklim investasi di Kabupaten Meranti.

Ketua KNPI Kepulauan Meranti, Asyari, Rabu (1/6) mengatakan pihaknya sangat menyesalkan atas kejadian yang dilakukan massa. Karena hal itu jelas dilarang dalam undang-undang dan hukum yang berlaku.

“Bukan seperti itu jalan dalam menyelesaikan permasalahan. Bagaimana nantinya daerah ini mau berkembang, jika imej yang ditampilkan seperti itu, melakukan kerusuhan dengan aksi pembakaran,” kata Asyari yang akrab dipanggil Adek itu.

Ditambahkan Sekretaris KNPI Kepulauan Meranti, Hardiansyah pada kesempatan berbeda, menyebutkan lebih banyak kerugian yang akan diterima Kepulauan Meranti daripada efek positifnya sendiri. Bagaimana tidak, saat ini massa yang melakukan tindakan anarkis tersebut tidak akan tenang. Sementara pihak perusahaan yang menjadi korban penyerangan itu, tetap akan berjalan di Kepulauan Meranti.

“Jadi percuma saja kalau kita melakukan pengrusakan serta tindakan anarkis. Banyak opsi lain yang bisa diambil. Kalau memang tidak setuju atas operasional itu maka bisa dilakukan cara lainnya yang lebih bijaksana, tanpa harus ada yang dikorbankan,” kata Hardiansyah.

Pengurus KNPI lainnya, Jhoni menegaskan yang dilakukan sekelompok massa itu jelas tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak. Termasuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri.

“Jika imej suatu daerah sudah tidak aman, maka para investor akan menolak untuk berinvestasi ke daerah kita. Jelas tindakan ini berpengaruh kepada iklim investasi,” jelasnya. (amy)

Isi dari berita ini yakni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepulauan Meranti melalui Ketuanya – Asyari, mengecam aksi massa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan eskavator dan *camp* karyawan PT RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain Asyari, berita ini juga memuat pernyataan dari Hardiansyah, Sekretaris Jenderal KNPI Kepulauan Meranti dan Jhoni, Pengurus KNPI Kepulauan Meranti.

3. *Riau Pos*, edisi Kamis 2 Juni 2011

Kasus Pembakaran Kamp Harus Ditangani Persuasif

SELATPANJANG (RP) – Dalam penyelesaian kasus pembakaran kamp RAPP oleh pihak keamanan, anggota DPRD menginginkan agar ditangani dengan cara persuasif.

Karena yang melakukan aksi ini adalah masyarakat yang menolak kebijakan tentang hutan di Pulau Padang, bukan terorisme.

“Kita ingin pihak kepolisian menangani persoalan ini secara persuasif. Kita tidak mau dalam pengejaran tersangka seperti memburu terorisme,” tegas anggota DPRD Kepulauan Meranti Hafizan Abas, Rabu (1/6) di Selat Panjang.

Menurutnya jangan hanya masyarakat yang disalahkan atas aksi itu. Sebab, intinya, kata politisi Partai Demokrat itu ada yang menjadi pemicu, kenapa masyarakat bertindak anarkis.

“Cobalah kita berpikir objektif. Kalau perusahaan juga mendengarkan aspirasi masyarakat, tentunya tidak akan terjadi hal seperti ini,” terangnya.

Melihat kondisi ini, tentunya ada dari salah satu pihak, baik perusahaan, maupun masyarakat sendiri yang tetap memaksakan kehendaknya. Oleh karena itulah terjadi tindakan anarkis seperti itu.

“Maka terjadilah hal ini. Pasti ada salah satu pihak yang tetap memaksakan diri dan tidak mau mengalah,” sebut Hafizan.

Dijelaskan Hafizan, seluruh pihak juga seperti membiarkan hal itu bisa terjadi dan tidak membantu melakukan mediasi. “Kita hadir di lembaga DPRD, dipilih masyarakat, bukan dari HTI itu. Kita sebagai perantara, bukan memperkeruh persoalan,” katanya menutup pembicaraan. (amy)

Berita ini berisi pernyataan anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Meranti, Hafizon Abas, yang turut serta dalam mengawal perkembangan kasus pembakaran eskavator dan *camp* karyawan PT RAPP di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia berharap pemerintah dan pihak berwajib dapat menangani kasus ini secara persuasif.

4. *Tribun Pekanbaru*, edisi Rabu 1 Juni 2011

Bentangkan Baliho Komnas HAM

Warga Pulau Padang dan STR Datangi RAPP

PEKANBARU, TRIBUN – Tak kurang dari 1.500 warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, mendatangi areal Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Sungai Hiu, Tanjung Padang, Senin (30/5). Mereka tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR).

Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Riduan menyatakan, tujuan anggotanya mendatangi RAPP untuk mengingatkan surat rekomendasi dari

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dilayangkan ke RAPP dan Kementerian Kehutanan 29 April 2011.

Dalam rekomendasi tersebut, kata Riduan, RAPP dan Kementerian Kehutanan harus memberi jawaban atau respon selambat-lambatnya 30 hari setelah surat dilayangkan. “Namun hingga hari ini sama sekali belum ada respon,” kata Riduan saat dihubungi *Tribun*, Selasa (31/5).

Untuk mengingatkan kembali rekomendasi Komnas HAM tersebut, anggota STR memasang dua baliho besar yang bertuliskan surat rekomendasi Komnas HAM. Namun ribuan warga yang diangkut menggunakan tujuh kapal ini harus kecewa karena staf RAPP yang menemui mereka, Supandi, tidak memberi jawaban sesuai harapan.

Menurut Riduan jika ingin menanyakan mengenai surat rekomendasi tersebut, anggota STR disarankan untuk menemui tim terpadu, Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam surat rekomendasi itu Komnas HAM yang dalam bahasa Riduan disebut sebagai penengah, meminta perusahaan milik Sukanto Tanoto tersebut menghentikan aktifitasnya untuk sementara waktu. Sedangkan kepada Kementerian Kehutanan, Komnas HAM merekomendasikan agar Dephut melakukan peninjauan ulang tentang terbitnya SK 327 tahun 2009.

Aksi penolakan RAPP ini berakhir dengan tertib pada pukul 17.00. Sebelumnya, diungkapkan oleh Sutarno, ada beberapa anggota STR yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam. “Tapi orang-orang yang membawa senjata tajam mau meninggalkan senjatanya dan melakukan aksi dengan damai. Mereka masih menghargai organisasi walaupun emosi sudah meninggi,” lanjut dia.

Usai aksi besar-besaran ini Sutarno menegaskan, STR sebagai organisasi akan lepas tangan jika sewaktu-waktu masyarakat Pulau Padang bertindak sendiri. “Satu tahun belakangan kami sudah melakukan aksi sebanyak enam kali. Termasuk ke Jakarta beberapa waktu lalu,” katanya.

Sementara itu, terkait aksi anggota STR yang berusaha menghentikan operasional PT RAPP di Pulau Padang, *Forest Campaigner Greenpeace*, Rusmadya, menyambut baik aksi tersebut. Menurutnya, aksi itu merupakan sebuah proses dari masyarakat setempat untuk menyelamatkan daerah tempat tinggalnya, terutama hutan alam dari ancaman kerusakan.

Menurut Rusmadya, sebenarnya merupakan sebuah bukti nyata adanya ketidakberesan di Pulau Padang antara RAPP dan masyarakat setempat. Seharusnya, pemerintah tanggap dengan bermacam aksi penolakan ini. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun aktivis pecinta lingkungan.

Melihat kasus ini, Rusmadya menilai adanya kemungkinan permainan antara pemerintah dan perusahaan. Sehingga pemerintah terkesan tidak berani berbuat banyak menyelesaikan polemik ini. (cr11)

Berita ini berisikan kronologi serta latar belakang aksi masyarakat Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti yang menolak kehadiran PT RAPP di pulau tersebut. Aksi digambarkan berjalan damai dengan pengawasan dari pihak kepolisian setempat, serta jauh dari kesan anarkis. Wartawan *Tribun Pekanbaru* mewawancarai Sutarno, koordinator aksi; Muhammad Riduan, Ketua Serikat Tani Riau (STR) Kabupaten Kepulauan Meranti serta Rusmadya, *Forest Campaigner Greenpeace*.

5. *Tribun Pekanbaru*, edisi Kamis 2 Juni 2011

Ada Indikasi Salahkan STR

Eskavator PT RAPP dibakar massa

PEKANBARU, TRIBUN – Serikat Tani Riau (STR) menolak dikait-kaitkan dengan terbakarnya dua unit eskavator dan dua *camp* karyawan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Senin (30/5) malam di Desa Tanjung Padang. Sanggahan itu disampaikan oleh Ketua Umum STR, Teri Hendra Chaniago pada konferensi pers di kantornya, Jalan Takari nomor 002, Sukajadi, Pekanbaru, Rabu (1/6).

Pada kesempatan itu, Hendra didampingi Sekretaris Jenderal STR, Desri Kurniawati dan Kuasa Hukum STR, Sugiharto, SH menurut Desri, anggapan yang menuduh STR sebagai dalang dibalik peristiwa tersebut, merupakan tuduhan yang tidak beralasan.

Pada Senin (30/5) sejak pukul 14.30 hingga pukul 17.00, STR memang menggelar aksi demonstrasi di Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti dengan mengerahkan sekitar 1500 massa. Namun, lanjut Desri, aksi tersebut berjalan tertib.

“Sebelum aksi, kami sudah memberitahu pihak kepolisian. Bahkan kami juga meminta pengawalan polisi selama melakukan aksi dan perjalanan pulang,” tutur Hendra.

Kuasa hukum STR, Sugiharto berharap pihak kepolisian segera menetapkan tersangka dalam kasus pembakaran eskavator dan *camp* PT RAPP tersebut. Menurutnya dengan adanya tersangka, suasana Pulau Padang akan kembali kondusif. Saat ini, lanjutnya, sudah ada tiga orang yang ditangkap pihak kepolisian. Mereka merupakan warga Desa Tanjung Padang, Kecamatan Merbau.

Namun di sisi lain, Sugiharto juga mengingatkan aparat kepolisian setempat tidak asal tangkap. Korps baju coklat ini harus memiliki bukti kuat sebelum melakukan penangkapan. “Polisi harus mendedepankan azas praduga tak bersalah,” kata dia.

Jika aparat kepolisian melakukan penangkapan secara membabi buta terhadap masyarakat Pulau Padang tanpa bukti, Sugiharto yang juga pengacara dari

Lembaga Advokasi Bantuan Hukum (LBH) Riau ini berjanji melakukan langkah-langkah hukum.

Sekretaris Jenderal STR, Desri Kurniwati menduga kemungkinan dalang aksi pembakaran tersebut adalah orang-orang yang pro dengan RAPP. “Yang menginginkan perusahaan tersebut terus beroperasi,” tegasnya. Ia mengindikasikan itu sebagai upaya untuk mengambinghitamkan STR dalam kasus ini. Alasannya karena selama ini STR yang selalu menentang keberadaan RAPP. Dengan adanya kasus ini, temtu saja aparat akan mempunyai alasan untuk menangkap para pemimpin STR di lapangan.

Ia menambahkan, dari kejadian tersebut, Pulau Padang saat ini terisolir. Hal itu karena Pelabuhan Buton dan Pelabuhan Kurau ditutup oleh Polres Bengkalis untuk mencegah warga keluar dari pulau tersebut. “Kalau hal ini tidak segera diselesaikan, maka masyarakat yang akan menanggung kesengsaraan,” ujarnya.

Selain itu, Desri juga menyesalkan keputusan RAPP yang baru menghentikan aktifitasnya sementara ketika sudah ada insiden. Dari awal, seharusnya RAPP dan institusi yang terkait menyadari potensi konflik yang timbul karena keberadaan konsesi lahan itu.

Hal senada diungkapkan ketua STR Kepulauan Meranti, Muhammad Riduan. Ia menegaskan aksi pembakaran itu bukan tanggungjawab STR. Karena pada waktu pembakaran terjadi, seluruh anggota STR sudah meninggalkan lokasi demonstrasi. (cr11).

Pembangunan jalan dihentikan

Asisten manajer hubungan media RAPP, Salomo Sitihang menyatakan pihaknya mengambil langkah antisipasi guna mencegah kerusakan dan bahaya lainnya, manajemen PT RAPP memutuskan untuk mrnghentikan sementara kegiatan pembangunan *jetty* dan jalan koridor di Dusun Sei Hiu.

RAPP juga sudah melaporkan kejadian tersebut secara resmi ke Polres Bengkalis supaya segera dilakukan penyelidikan atas peristiwa yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi perusahaan serta menimbulkan trauma kepada karyawan dan kontraktor serta masyarakat.

PT RAPP menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dan bertindak cepat agar masalah ini tidak terulang di masa yang akan datang. Sebagai perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah dalam hal ini, Menteri Kehutanan RI untuk berinvestasi di Pulau Padang, RAPP senantiasa berupaya untuk menaati hukum dan peraturan yang berlaku serta komitmen bekerjasama dengan semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat setempat demi kelancaran operasional.

Komitmen RAPP di Pulau Padang ditekankan pada pengelolaan hutan secara lestari dan bertanggungjawab dengan program-program pemberdayaan masyarakat. “Mudah-mudahan kehadiran RAPP di Pulau Padang dapat memberi manfaat bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujar dia. (cr11).

Sebagian besar berita ini berisikan hasil konferensi pers STR yang menolak dikait-kaitkan dengan peristiwa terbakarnya dua unit eskavator dan *camp* karyawan milik PT RAPP di Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti. Wartawan *Tribun Pekanbaru* mengutip pernyataan Teri Hendra Chaniago, Ketua Umum STR; Desri Kurniawati, Sekretaris Jenderal STR; Sugiharto SH, Kuasa Hukum STR; Muhammad Riduan, Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti; serta Salomo Sitohang, Asisten Manajer Hubungan Media RAPP.

6. *Tribun Pekanbaru*, edisi Jum'at 3 Juni 2011

Rekomendasi Komnas HAM Diabaikan

Walhi Minta Izin HTI PT RAPP Dihentikan Sementara

Pekanbaru, Tribun – Direktur Eksekutif wahana lingkungan hidup (Walhi) Riau Hariansyah Usman mengatakan, insiden di Pulau Padang akhir pekan lalu, merupakan klimaks dan akumulasi semua persoalan yang terjadi di daerah itu terkait izin HTI PT RAPP. “persoalan-persoalan lama yang terus dibiarkan, tidak ada penyelesaian persoalan, mengakibatkan insiden ini terjadi,” kata Hariansyah berbincang dengan *Tribun*, Kamis (2/6).

Walhi sejak awal mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di Pulau Padang, baik dengan pemerintah, maupun dengan perusahaan. Bahkan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi terhadap persoalan di Pulau Padang.

“Sekitar sebulan lalu Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi. Intinya, menyarankan penghentian sementara kegiatan RAPP di Pulau Padang sambil mencari penyelesaian persoalan,” ujar Hariansyah.

Namun, kata Hariansyah, minimnya respon, baik dari pemerintah maupun dari RAPP, makin memperburuk keadaan. Pasca insiden akhir pekan lalu, Hariansyah menyerankan ke depan baik pemerintah maupun RAPP lebih bijaksana dalam menyikapi tuntutan masyarakat. Adanya respon yang baik dari RAPP maupun pemerintah akan mempercepat penyelesaian persoalan di Pulau Padang.

“Dan kementerian kehutanan jangan tutup mata *dong*. Karena ini semua diawali dari kebijakan kementerian memberikan izin pembukaan lahan kepada RAPP di Pulau Padang. Walhi sejak awal menolak ekspansi HTI untuk RAPP di Riau,

karena kami pikir sudah cukuplah, yang sudah ada saja belum dimaksimalkan,” tutur Hariansyah.

Pulau padang, lanjut Hariansyah, sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Karena, hampir 100 persen pulau itu merupakan lahan gambut. Tanpa ada HTI pun, pulau itu masih terancam penurunan permukaan gambut dan abrasi, serta meningkatnya tinggi permukaan laut. “Sudahlah, jangan dipaksakan HTI di sana. Mau dalih pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lainnya itu, sudahlah, jangan paksakan lagi,” kata Hariansyah.

Mengenai penyelidikan pelaku pembakaran eskavator milik RAPP di Pulau Padang Senin kemarin, Hariansyah meminta pihak kepolisian berhati-hati dalam bertindak dan tetap mengedepankan profesionalisme. “Jangan sampai menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Jika itu terjadi, WALHI akan berada pada baris terdepan untuk membela warga Pulau Padang,” sebut dia.

Asisten Manajer Hubungan Media RAPP, Salomo Sitohang mengatakan pihaknya mengambil langkah untuk mencegah kerusakan lainnya. “Manajemen PT RAPP memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan jembatan koridor di Dusun Sei Hiu. Dan RAPP juga sudah melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada polisi.

Komisi A Panggil Dinas Kehutanan

Komisi A DPRD Riau dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan Dinas Kehutanan Riau guna membicarakan teknis tata batas lahan perusahaan dengan pemukiman masyarakat. Ketidakjelasan tata batas tersebut dianggap menjadi biang terjadinya sengketa serta bentrok perusahaan dengan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi A DPRD Riau, Bagus Santoso, Kamis (2/6). Menurut politisi PAN ini, seringnya terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan dikarenakan perusahaan selama ini tidak pernah memperhatikan soal tata batas. Padahal semestinya pemerintahan kabupaten dan provinsi mesti dilibatkan dalam penerapan tata batas tersebut.

“Padahal kita pernah menegaskan kepada pihak perusahaan agar tidak melakukan eksplorasi sebelum dipastikannya tata batas lahan. Bahkan kita sudah mengundang BLH serta perusahaan dan tokoh lembaga masyarakat yang tersangkut masalah tata batas sudah wanti-wanti agar perusahaan bisa memastikannya sebelum memulai eksplorasi,” ujar Bagus.

Namun sejauh ini menurutnya, perusahaan belum memberikan sinyal positif terkait tata batas lahan. Bahkan bentuk perhatian ke masyarakat desa juga dinilai masih sangat kurang. Perusahaan seolah bersikap sewenang-wenang setelah keluar izin terkait eksplorasi lahan.

“Perusahaan seakan sudah merasa di atas angin setelah mendapat izin. Kondisi itulah yang kini menyebabkan persoalan di tengah masyarakat. Masalah ini cenderung tidak diselesaikan dengan perusahaan hanya berpegangan pada izin tersebut. Padahal ada persoalan lain yang tidak kalah pentingnya untuk diselesaikan, yakni persoalan tapal batas tersebut,” jelas Bagus. (brt)

Berita ketiga ini berisikan analisa Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau mengenai insiden di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dari sisi lingkungan. Selain itu, konflik ini juga dilihat dari sisi administrasi dan izin, yakni terlihat adanya sengketa lahan di wilayah konsesi izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP di wilayah tersebut, yang disampaikan pihak legislatif. Wartawan *Tribun Pekanbaru* mewawancarai Hariansyah Usman, Direktur Walhi Riau; Bagus Santoso, Ketua Komisi A DPRD Riau serta mengutip pernyataan Salomo Sitohang, Asisten Manajer Hubungan Media RAPP.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pengantar

Setelah dilakukan penyajian dan pengolahan data pada bab III, maka data tersebut dianalisis secara ilmiah berdasarkan pada teori dan konsep yang digunakan pada penelitian ini. Pada bab ini penulis akan menganalisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan menuliskan hasil analisa dalam bentuk kata-kata dan kalimat. Data tersebut akan dikelompokkan sesuai media, yakni Riau Pos dan Tribun Pekanbaru. Dua kelompok data ini penulis analisa menggunakan empat unsur model analisis *framing* sebagaimana dirumuskan Robert N Entman dalam melihat arah pemberitaan suatu media. (Eriyanto, 2007: 189-191), yaitu:

1. *Define problems* (Pendefenisian masalah)

Define problems adalah elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai *framing*. Elemen ini merupakan *master framing* atau bingkai yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh media.

2. *Diagnose cause* (memperkirakan penyebab masalah)

Diagnose cause adalah elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor atau sumber masalah dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (*what*) tetapi juga bisa berarti siapa (*who*).

3. *Make moral judgment* (membuat pilihan moral)

Make moral judgment adalah elemen *framing* yang dipakai untuk menggunakan atau memberi argumentasi pada defenisi masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat mendukung gagasan tersebut.

4. *Treatment recommendation* (menekankan penyelesaian)

Treatment recommendation adalah elemen yang dipakai untuk menilai jalan apa yang dipilih oleh suatu media untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau peristiwa yang terjadi. Penyelesaian ini sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat, siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah tersebut.

B. Analisis *Framing* Berita Riau Pos

Penulis mendapatkan 3 (tiga) berita terkait konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP pada Harian Riau Pos edisi 1-7 Juni 2011.

Pada edisi 1 Juni 2011, Riau Pos memuat berita kronologis peristiwa pembakaran, dengan memberi judul: *Camp* RAPP Dibakar Massa. Berita ini memuat foto eskavator RAPP yang dibakar dilengkapi kronologis peristiwa. Wartawan Riau Pos mendapat informasi kronologi peristiwa ini dari Kepala *Security* RAPP yang berjaga di *camp* tersebut. Selain pihak keamanan, berita edisi ini banyak memuat komentar pihak kepolisian, dalam hal ini Kepala Polisi Resor Bengkalis yang terjun langsung ke lapangan beserta Kepala Polisi Sektor Merbau.

Pada berita tersebut juga dimuat komentar PT RAPP selaku korban peristiwa pembakaran tersebut, yakni pernyataan dari Salomo Sitohang, Asisten Manajer Hubungan Media RAPP. Ia mengatakan kejadian ini mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu, peristiwa ini juga menimbulkan trauma kepada karyawan, kontraktor, serta masyarakat.

Pelaku peristiwa memang belum terungkap, namun kecurigaan mengarah kepada Serikat Tani Riau (STR) yang melakukan aksi pada siang hingga sore hari sebelum peristiwa terjadi. Riau Pos melakukan konfirmasi kepada Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Riduan, namun karena tidak menjawab maka dijelaskan oleh Sutarno, Sekretaris STR Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut Sutarno, pihaknya tidak menampik tuduhan berbagai kalangan kepada organisasinya sebagai pelaku dari aksi pembakaran tersebut. Sebagai pelengkap, Riau Pos turut memasukkan komentar Ketua Komisi II DPRD, Ruby Handoko terkait peristiwa pembakaran *camp* serta eskavator milik RAPP di Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya jalan anarkis yang diambil sebagian pihak ini bukan solusi yang baik dalam menyelesaikan masalah. Bila memang ada perbedaan pandangan terhadap izin HTI di Meranti, tentu bisa dimusyawarahkan, tambah Ruby seperti dimuat Riau Pos.

Berita kedua terkait konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP yang dimuat Riau Pos edisi Kamis, 2 Juni 2011, diberi judul: KNPI Meranti Kecam Aksi di Pulau Padang. Pada berita ini, Riau Pos memuat komentar pihak Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti

terhadap aksi pembakaran *camp* dan eskavator RAPP di Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Senin (30/5) malam. Berita ini intinya kecaman KNPI Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni disampaikan oleh Asyari, Ketua; Hardiansyah, Sekretaris dan Jhoni, Pengurus KNPI Kabupaten Kepulauan Meranti terkait aksi pembakaran terhadap *camp* dan eskavator PT RAPP. Menurut Asyari, perbuatan ini dapat merusak iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana perkembangan daerah akan terhambat disebabkan imej yang ditimbulkan oleh aksi kekerasan dan pengrusakan tersebut.

Lalu, Hardiansyah mengatakan, massa yang melakukan tindakan tersebut tidak akan tenang, sementara perusahaan selaku korban tetap akan berjalan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jhoni, anggota pengurus KNPI menambahkan, tindakan ini merugikan banyak pihak. Termasuk pemerintah kabupaten, turut merasakan dampak aksi tersebut. Berita ini memposisikan pelaku aksi sebagai pihak perusuh dan perusak iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, padahal sebagai kabupaten bungsu di Riau, Meranti sangat membutuhkan investasi dari berbagai pihak guna membangun daerahnya menjadi lebih berkembang dan maju di segala bidang.

Berita ketiga terkait konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP yang dimuat Riau Pos edisi Kamis, 2 Juni 2011, diberi judul: Kasus Pembakaran Kamp Harus Ditangani Persuasif. Berita kali ini, berisikan pendapat pihak DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yakni Hafizan Abas. Menurutnya, sebaiknya pihak kepolisian melakukan penanganan kasus ini dengan

cara persuasif. Hal ini disebabkan masyarakat melakukan penolakan karena masalah hutan dan lahan, bukan terorisme. Hafizan punya analisa tersendiri terkait aksi pembakaran dan perusakan kamp serta eskavator PT RAPP. Ada pemicu sebelumnya, jika perusahaan mendengar aspirasi masyarakat, tentu tidak akan terjadi hal seperti ini. Kedua belah pihak tetap memaksakan kehendaknya, hingga terjadi tindakan anarkis seperti kasus ini. Lebih lanjut, Hafizan beranggapan seperti ada pembiaran dari seluruh pihak hingga terjadi peristiwa pembakaran dan perusakan aset RAPP di Pulau Padang. Di akhir berita, ia mengharapkan kehadiran DPRD sebagai perantara guna menyelesaikan persoalan masyarakat Meranti, bukan malah memperkeruh suasana.

Secara umum, tiga berita yang dihadirkan Riau Pos terkait aksi perusakan kamp dan pembakaran eskavator milik PT RAPP, didominasi komentar pihak kepolisian, perusahaan, organisasi kepemudaan serta anggota legislatif. Sementara, komentar warga Pulau Padang sendiri hanya terwakilkan dengan bantahan dari Sutarno, Sekretaris Serikat Tani Riau (STR) Kabupaten Kepulauan Meranti terkait isu dan tuduhan berbagi pihak sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap aksi tersebut.

Berita Riau Pos sangat lemah dalam hal verifikasi fakta. Ini terlihat dari tulisan yang menelan mentah-mentah komentar pihak kepolisian dan perusahaan mengenai kronologis peristiwa. Sementara wartawan tidak melakukan verifikasi kebenaran informasi yang didapat. Padahal dalam buku *A9ama Saya Adalah Jurnalisme* (Andreas Harsono, 2010: 29), Andreas menyarikan Sembilan Elemen

Jurnalisme yang dirumuskan Bill Kovach dan Tom Rosentiel. Keduanya wartawan senior Amerika yang prihatin terhadap arah tumbuh kembang media saat ini. Salah satu elemen jurnalisme itu yakni elemen kedelapan, wartawan wajib menjadikan beritanya proporsional dan komprehensif.

Hasil analisis dengan model Robert Entman sebagai berikut:

1. Definisi Masalah

Riau Pos mendefenisikan masalah konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP sebagai anarkis massa, dimana wartawan menulis komentar pihak kepolisian yang berwenang seperti termuat pada paragraf enam dan tujuh berita edisi Rabu, 1 Juni 2011, sebagai berikut.

Mendapat kabar *camp* RAPP tersebut hangus terbakar, Polres Bengkalis bersama Polsek Merbau langsung turun ke lokasi kejadian. “Kami dapat kabar massa membakar eskavator dan *camp*. Massa juga masih di lapangan melakukan tindak anarkis. Namun kami hanya memantau dari laut,” ujar Kasat Intel, AKP Yudi Falmi kepada *Riau Pos*, Selasa (30/5) siang saat ditemui di lokasi bersama Kapolsek Merbau, AKP Syawaluddin Pane.

Kapolres Bengkalis, AKBP Ahmad Kartiko yang juga langsung turun ke lokasi *camp* RAPP yang terbakar itu, Selasa (31/5) menyebutkan kepada *Riau Pos*, pihak Polres Bengkalis telah membentuk tim olah TKP untuk mengusut kasus anarkis ini. Ini adalah tindakan pidana,” kata AKBP Ahmad Kartiko.

Pada paragraf enam, ditekankan bahwa masalah yang terjadi adalah massa melakukan pembakaran dan perusakan aset perusahaan: eskavator dan *camp*. Paragraf selanjutnya menyatakan bahwa peristiwa ini adalah kasus anarkis dan Polres Bengkalis telah membentuk tim olah TKP guna mengusutnya.

2. Memperkirakan sebab masalah (*diagnose cause*)

Dalam hal ini Riau Pos memandang permasalahan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT. RAPP hanyalah berbeda pandangan soal izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP di pulau tersebut. Terlihat dari dimuatnya komentar Rubi Handoko, Anggota DPRD Riau Komisi III, pada paragraf 16 berita edisi Rabu, 1 Juni 2011 sebagai berikut.

“Jalan anarkis yang diambil oleh sekelompok massa ini bukan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah. Kenapa harus diambil dengan jalan seperti ini. Jika ada perbedaan terhadap pandangan masuknya HTI ke Meranti, tentunya bisa dimusyawarahkan,” ujar Rubi Handoko yang akrab dipanggil Akok kepada *Riau Pos*, Selasa (31/5) di lapangan.

Perbedaan pandangan inilah yang dibingkai (*frame*) oleh Riau Pos sebagai penyebab konflik di masyarakat Pulau Padang dengan perusahaan.

3. Membuat Keputusan Moral (*Make moral judgement*)

Dari sisi moral, Riau Pos membingkai konflik ini telah merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah daerah sendiri. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini seperti dimuat Riau Pos pada berita edisi Kamis, 2 Juni 2011, paragraf empat, lima, enam dan tujuh. Isinya sebagai berikut.

Ditambahkan Sekretaris KNPI Kepulauan Meranti, Hardiansyah pada kesempatan berbeda, menyebutkan lebih banyak kerugian yang akan diterima Kepulauan Meranti daripada efek positifnya sendiri. Bagaimana tidak, saat ini massa yang melakukan tindakan anarkis tersebut tidak akan tenang. Sementara pihak perusahaan yang menjadi korban penyerangan itu, tetap akan berjalan di Kepulauan Meranti.

“Jadi percuma saja kalau kita melakukan pengrusakan serta tindakan anarkis. Banyak opsi lain yang bisa diambil. Kalau memang tidak setuju atas operasional itu maka bisa dilakukan cara lainnya yang lebih bijaksana, tanpa harus ada yang dikorbankan,” kata Hardiansyah.

Pengurus KNPI lainnya, Jhoni menegaskan yang dilakukan sekelompok massa itu jelas tindakan anarkis yang merugikan banyak pihak. Termasuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri.

“Jika imej suatu daerah sudah tidak aman, maka para investor akan menolak untuk berinvestasi ke daerah kita. Jelas tindakan ini berpengaruh kepada iklim investasi,” jelasnya.

Penekanan Riau Pos terhadap aksi massa hingga menyebabkan rusak dan terbakarnya aset perusahaan ini telah merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah sendiri. Pengaruh lainnya juga sampai pada iklim investasi daerah tersebut.

4. Menekankan penyelesaian (*Suggest Remedies*)

Penyelesaian konflik warga Pulau Padang dengan PT RAPP disarankan Riau Pos dengan mengutip komentar Hafizan Abbas, anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, pada berita edisi Kamis, 2 Juni 2011 paragraf dua dan tiga, isinya sebagai berikut.

“Kita ingin pihak kepolisian menangani persoalan ini secara persuasif. Kita tidak mau dalam pengejaran tersangka seperti memburu terorisme,” tegas anggota DPRD Kepulauan Meranti Hafizan Abbas, Rabu (1/6) di Selat Panjang.

Menurutnya jangan hanya masyarakat yang disalahkan atas aksi itu. Sebab, intinya, kata politisi Partai Demokrat itu ada yang menjadi pemicu, kenapa masyarakat bertindak anarkis.

Setelah sebelumnya pada beita edisi Rabu, 1 Juni 2011 sebagaimana dikatakan oleh Rubi Handoko, anggota DPRD Provinsi Riau, hendaknya pihak terkait menggunakan jalan musyawarah dalam menyelesaikan konflik.

Pada berita edisi Kamis, 2 Juli 2011 ini, Hafizan berharap pihak kepolisian menangani persoalan ini secara persuasif dan jangan seperti memburu

teroris. Ia juga menambahkan, jangan hanya menyalahkan masyarakat atas aksi tersebut, namun mesti dikaji pemicu masyarakat hingga melakukan tindak anarkis tersebut.

Tabel berikut memuat hasil analisis *framing* pemberitaan konflik warga Pulau Padang dengan PT. RAPP di Harian Riau Pos.

Tabel IV.1
Rangkuman hasil analisis *framing* berita konflik
warga Pulau Padang dengan PT RAPP di Harian Riau Pos

Model	Riau Pos
<i>Define Problems</i> (definisi masalah)	Anarkis massa (pengrusakan dan pembakaran)
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan sebab masalah)	Perbedaan pandangan soal izin HTI
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah
<i>Suggest Remedies</i> (menekankan penyelesaian)	Musyawarah dan persuasif

Sumber: Hasil analisis

C. Analisis Framing Berita Tribun Pekanbaru

Penulis mendapatkan 3 (tiga) berita terkait konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP pada Harian Riau Pos edisi 1-7 Juni 2011. Pada berita pertama, edisi Rabu 1 Juni 2011, Tribun memuat berita aksi warga

Pulau Padang yang tergabung dalam Serikat Tani Riau (STR). Tribun memberi judul “Bentangkan Baliho Komnas HAM”. Aksi ini dilakukan warga dan STR guna mengingatkan kembali surat rekomendasi dari Komnas HAM ke RAPP dan Kementerian Kehutanan, guna menghentikan aktifitasnya sementara waktu.

Pada berita ini disebutkan, sekitar 1.500 warga ikut dalam aksi ini, sebagian besar diangkut dengan kapal dari desa tempat tinggal mereka. Namun warga menjadi kecewa karena Supandi, staf RAPP yang menemui mereka tidak memberi jawaban sesuai harapan. Tribun menambahkan, selain berisikan rekomendasi penghentian sementara operasional RAPP di Pulau Padang, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Kemenhut melakukan peninjauan ulang tentang terbitnya SK 327 Tahun 2009. Greenpeace, organisasi pemerhati lingkungan global, menilai aksi ini sebagai proses masyarakat dalam menyelamatkan tempat tinggalnya terutama hutan alam dari ancaman kerusakan. Di akhir berita, Rusmadya dari Greenpeace mengatakan adanya kemungkinan permainan antara pemerintah dan perusahaan hingga pemerintah tidak dapat berbuat banyak guna menyelesaikan konflik tersebut.

Berita kedua, Tribun memuat berita terkait konflik warga Pulau Padang dengan PT RAPP dengan judul “Ada Indikasi Salahkan STR”, dengan dua sub judul: Eskavator PT RAPP Dibakar Massa dan Pembangunan Jalan Dihentikan. Pada Sub Judul pertama, Tribun memuat konferensi pers STR dalam menolak dikaitkannya mereka dalam kasus terbakarnya dua unit eskavator serta *camp* karyawan milik PT RAPP di Desa Tanjung Padang, Pulau Padang pada Senin (30/5) malam, setelah pada siang hingga sore harinya STR melakukan aksi dengan membentangkan baliho

berisikan surat rekomendasi Komnas HAM terkait aktifitas PT RAPP di Pulau Padang. Dengan mengutip pernyataan pihak STR, yakni dari Teri Hendra Chaniago selaku ketua umum, Desri Kurniawati selaku sekretaris jenderal serta Sugiharto selaku kuasa hukum, STR dengan tegas menolak terlibat dan dikaitkan aksi massa yang menyebabkan terbakarnya dua unit eskavator serta *camp* PT RAPP di Pulau Padang. Hendra menekankan bahwa aksi STR berlangsung tertib dan diketahui pihak kepolisian setempat. Bahkan menurutnya selama aksi hingga pulang selalu dalam pengawasan polisi.

Berita ini dengan jelas memuat kemungkinan tentang adanya dalang aksi yang merupakan orang-orang pro RAPP, sehingga menempatkan STR sebagai kambing hitam dari aksi tersebut. Alasannya karena selama ini STR-lah yang selalu menentang keberadaan RAPP di sana. Dengan adanya kasus ini, hingga aparat punya alasan untuk menangkap para pemimpin STR di lapangan. Sebagai pelengkap, Tribun juga memuat tanggapan Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Riduan. Katanya aksi pembakaran tersebut bukan tanggungjawab STR, karena saat aksi berlangsung, seluruh anggota STR telah meninggalkan lokasi demonstrasi.

Pada sub judul kedua, Tribun memberi judul “Pembangunan Jalan Dihentikan” dengan fokus pada klarifikasi pihak PT RAPP terkait antisipasi untuk mencegah kerusakan dan bahaya lain pada aset mereka. Untuk itu pihaknya memutuskan menghentikan sementara aktifitas di lokasi konflik tersebut. Sebagian besar isi dari klarifikasi ini hampir sama seperti berita yang dimuat Riau Pos, karena

wartawan mengutip pernyataan ini dari siaran pers Salomo Sitohang selaku Manajer Hubungan Media RAPP.

Berita ketiga, Tribun memberi judul “Rekomendasi Komnas Diabaikan”. Hariansyah Usman, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau menjadi narasumber utama berita ini dengan penekanan pada permintaan mereka agar izin HTI PT. RAPP di Pulau Padang dikaji ulang, serta meminta agar rekomendasi Komnas HAM terkait HTI PT. RAPP dilaksanakan. Ia juga menilai respon dari perusahaan dan pemerintah terkait rekomendasi ini sangat minim, sehingga memperburuk keadaan pasca konflik yang terjadi di Pulau Padang. Bahkan menurutnya Kementerian Kehutanan selaku pihak yang menerbitkan izin HTI di sana, terkesan tutup mata dengan peristiwa di lapangan. Walhi menilai cukup sudah izin HTI yang dikeluarkan pemerintah di Provinsi Riau, izin sebelumnya saja masih belum dimaksimalkan. Sedangkan Pulau Padang sendiri, sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan karena hampir 100 persennya merupakan lahan gambut. Tanpa izin HTI pun, Pulau Padang masih dihantui ancaman penurunan permukaan gambut, abrasi serta meningkatnya tinggi permukaan laut. Walaupun perusahaan menggunakan dalih pertumbuhan ekonomi, investasi maupun lainnya, Walhi meminta jangan dipaksakan lagi soal izin HTI di sana.

Terkait penyelidikan pelaku pembakaran aset PT RAPP, pihaknya meminta pihak kepolisian bertindak profesional. Walhi siap membela warga bila terjadi penggunaan cara-cara yang tidak wajar dalam proses penyelidikan tersebut. Di akhir

sub judul pertama, Tribun juga memuat klarifikasi pihak PT RAPP, namun isinya masih sama dengan berita yang dimuat di edisi sebelumnya.

Sub judul kedua, Tribun memberi judul “Komisi A Panggil Dinas Kehutanan”. Narasumbernya adalah Bagus Santoso, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Riau. Berita ini menekankan respon DPRD terkait konflik warga Pulau Padang dengan PT RAPP dengan cara melakukan pertemuan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Agenda pertemuan tersebut akan membicarakan soal tata batas lahan antara perusahaan dengan pemukiman masyarakat. Menurut Bagus, sebagian besar penyebab konflik warga dengan perusahaan di Riau disebabkan perusahaan yang kurang memperhatikan soal tapal batas lahan. Semestinya pemerintah kabupaten maupun provinsi dikaitkan dalam hal pembahasan penetapan tata batas lahan. Sejauh ini, perusahaan pemilik izin tersebut tidak memberikan sinyal positif terkait pembahasan tata batas lahan tersebut dengan masyarakat. Padahal pihak DPRD telah menegaskan kepada pihak perusahaan agar tidak memulai kegiatan eksplorasi sebelum dipastikannya tata batas lahan. Mereka juga meminta perusahaan agar dapat bersikap bijak terhadap masalah ini. Mayoritas perusahaan hanya bergantung pada izin yang telah didapat. Kondisi inilah yang menyebabkan persoalan di tengah masyarakat tidak terselesaikan. Perusahaan seolah merasa di atas angin setelah mendapat izin. Masalah inilah yang mesti diselesaikan perusahaan guna meredam konflik di masyarakat.

Tribun terkait konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP lebih banyak memuat dukungan serta sanggahan pihak Serikat Tani

Riau (STR) terkait konflik tersebut. Hari pertama berita memuat laporan aksi massa STR dalam demonstrasi terkait rekomendasi Komnas HAM soal penghentian sementara operasional PT RAPP hingga kajian ulang terkait izin HTI di Pulau Padang dilaksanakan.

Hari kedua Tribun memuat berita berisikan siaran pers STR soal penolakan mereka dikait-kaitkan dengan aksi pembakaran dan perusakan aset PT. RAPP di lokasi eksplorasi. Berita Tribun juga banyak memuat siaran pers, baik itu pihak STR maupun manajemen PT RAPP dan kurang disiplin dalam hal verifikasi. Mereka hanya mengutip pernyataan dan perkataan narasumber tanpa konfirmasi ulang ke lokasi kejadian.

Hasil analisis berita Tribun dengan analisis framing model Robert Entman adalah sebagai berikut:

a. Definisi Masalah (*Defining Problems*):

Tribun mendefenisikan masalah konflik ini sebagai upaya untuk mengambinghitamkan STR sebagai pelaku perusakan dan pembakaran aset PT RAPP di lokasi eksplorasi, sebagaimana ditulis wartawan Tribun pada berita edisi Kamis, 2 Juni 2011 paragraf delapan, sebagai berikut.

Sekretaris Jenderal STR, Desri Kurniawati menduga kemungkinan dalang aksi pembakaran tersebut adalah orang-orang yang pro dengan RAPP. “Yang menginginkan perusahaan tersebut terus beroperasi,” tegasnya. Ia mengindikasikan itu sebagai upaya untuk mengambinghitamkan STR dalam kasus ini. Alasannya kerana selama ini STR yang selalu menentang keberadaan RAPP. Dengan adanya kasus ini, temtu saja aparat akan mempunyai alasan untuk menangkap para pemimpin STR di lapangan.

Paragraf ini dengan jelas mengatakan ada upaya mengambing-hitamkan STR terkait aksi pembakaran dan perusakan aset PT RAPP karena selama ini mereka selalu menentang keberadaan perusahaan tersebut di Pulau Padang.

b. Memperkirakan sebab masalah (*Diagnose Cause*):

Sebab masalah konflik ini menurut Tribun adalah akumulasi persoalan terkait izin HTI PT RAPP di Pulau Padang yang tidak terselesaikan sejak izin tersebut dikeluarkan hingga proses eksplorasi lahan dilakukan. Hingga hal ini memicu konflik di tengah masyarakat, seperti terdapat pada berita edisi Jumat, 3 Juni 2011, paragraph pertama, yaitu:

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Hariansyah Usman mengatakan, insiden di Pulau Padang akhir pekan lalu, merupakan klimaks dan akumulasi semua persoalan yang terjadi di daerah itu terkait izin HTI PT RAPP. “persoalan-persoalan lama yang terus dibiarkan, tidak ada penyelesaian persoalan, mengakibatkan insiden ini terjadi,” kata Hariansyah berbincang dengan Tribun, Kamis (2/6).

Walhi sejak awal mendampingi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di Pulau Padang, baik dengan pemerintah, maupun dengan perusahaan. Bahkan, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi terhadap persoalan di Pulau Padang.

Penekanan konflik terkait izin perusahaan ini telah lama berlangsung, namun karena minimnya respon perusahaan dan pemerintah dalam penyelesaian masalah ini, maka situasi makin memanas dan sangat rawan akan meletusnya konflik di tengah lapangan.

Persoalan inilah yang dibingkai (*framing*) Tribun mengenai penyebab konflik warga Pulau Padang dan PT RAPP di lokasi eksplorasi.

c. Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*):

Tribun menekankan bahwa izin HTI sangat rentan merusak lingkungan sekitar operasional perusahaan pemilik izin, karena menurut narasumber yang

diwawancarai Tribun, lahan gambut di Pulau Padang rawan terhadap eksplorasi perusahaan, sebagaimana ditulis Tribun pada berita edisi Jumat, 3 Juni 2011, sebagai berikut.

“Dan kementerian kehutanan jangan tutup mata dong. Karena ini semua diawali dari kebijakan kementerian memberikan izin pembukaan lahan kepada RAPP di Pulau Padang. Walhi sejak awal menolak ekspansi HTI untuk RAPP di Riau, karena kami pikir sudah cukup lah, yang sudah ada saja belum dimaksimalkan,” tutur Hariansyah.

Pulau Padang, lanjut Hariansyah, sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan. Karena, hampir 100 persen pulau itu merupakan lahan gambut. Tanpa ada HTI pun, pulau itu masih terancam penurunan permukaan gambut dan abrasi, serta meningkatnya tinggi permukaan laut. “Sudahlah, jangan dipaksakan HTI di sana. Mau dalih pertumbuhan ekonomi, investasi, dan lainnya itu, sudahlah, jangan paksakan lagi,” kata Hariansyah.

Dengan penekanan pada kerusakan lingkungan tersebut, Tribun membuat keputusan moral bahwa banyak kerugian yang ditimbulkan dari penerbitan izin HTI PT RAPP di Pulau Padang.

d. Penekanan Penyelesaian (*Suggest Remedies*):

Penyelesaian yang ditekankan oleh Tribun terlihat dari berita edisi Jumat, 3 Juni 2011 paragraf ketiga, sebagai berikut.

“Sekitar sebulan lalu Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi. Intinya, menyarankan penghentian sementara kegiatan RAPP di pulau Padang sambil mencari penyelesaian persoalan,” ujar Hariansyah.

Namun, kata Hariansyah, minimnya respon, baik dari pemerintah maupun dari RAPP, makin memperburuk keadaan. Pasca insiden akhir pekan lalu, Hariansyah menyerankan ke depan baik pemerintah maupun RAPP lebih bijaksana dalam menyikapi tuntutan masyarakat. Adanya respon yang baik dari RAPP maupun pemerintah akan mempercepat penyelesaian persoalan di Pulau Padang.

Terkait rekomendasi ini, lengkapnya dimuat Tribun pada berita edisi Rabu, 1 Juni 2011, paragraf keenam sebagai berikut:

Dalam surat rekomendasi itu Komnas HAM yang dalam bahasa Riduan disebut sebagai penengah, meminta perusahaan milik Sukanto Tanoto tersebut menghentikan aktifitasnya untuk sementara waktu. Sedangkan kepada Kementerian Kehutanan, Komnas HAM merekomendasikan agar Dephut melakukan peninjauan ulang tentang terbitnya SK 327 tahun 2009.

Secara umum, saran yang disampaikan oleh Tribun adalah penghentian aktifitas perusahaan di Pulau Padang serta peninjauan ulang izin HTI PT RAPP di sana.

Tabel berikut memuat hasil analisis *framing* berita konflik warga Pulau Padang dengan PT. RAPP di Harian Tribun Pekanbaru.

Tabel IV.2
Hasil analisis *framing* berita konflik warga Pulau Padang
dengan PT RAPP di Harian Tribun Pekanbaru

Model	Tribun Pekanbaru
<i>Define Problems</i> (definisi masalah)	Upaya kambinghitam (fitnah) terhadap STR
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan sebab masalah)	akumulasi persoalan terkait izin HTI RAPP
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	Izin HTI RAPP sangat rentan merusak lingkungan
<i>Suggest Remedies</i> (menekankan penyelesaian)	Penghentian Operasional dan Tinjau kembali izin HTI RAPP

Sumber: Hasil analisis

D. Rangkuman Hasil Analisis

Tabel berikut memuat rangkuman semua hasil analisis *framing* dengan model Robert Entman terkait berita konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru (Edisi 1 – 7 Juni 2011).

Tabel IV.3
Rangkuman hasil analisis *framing* berita konflik warga Pulau Padang dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Harian Tribun Pekanbaru

Model	Riau Pos	Tribun Pekanbaru
<i>Define Problems</i> (definisi masalah)	Anarkis massa (pengrusakan dan pembakaran)	Upaya kambinghitam (fitnah) terhadap STR
<i>Diagnose Cause</i> (memperkirakan sebab masalah)	Perbedaan pandangan soal izin HTI	akumulasi persoalan terkait izin HTI RAPP
<i>Make Moral Judgement</i> (membuat keputusan moral)	merugikan banyak pihak, termasuk pemerintah	Izin HTI RAPP sangat rentan merusak lingkungan
<i>Suggest Remedies</i> (menekankan penyelesaian)	Musyawarah dan persuasif	Penghentian Operasional dan Tinjau kembali izin HTI RAPP

Sumber: Hasil analisis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *framing* pemberitaan konflik warga Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PT RAPP di Harian Riau Pos dan Tribun Pekanbaru (edisi Mei 2011), maka penulis menyimpulkan: Harian Riau Pos memandang masalah tersebut sebagai anarkis massa, penyebab masalah karena berbeda pandangan soal izin HTI PT. RAPP, menilai secara moral peristiwa tersebut merugikan banyak pihak termasuk pemerintah dan menyarankan penyelesaian masalah secara musyawarah dan persuasive. Harian Tribun Pekanbaru memandang masalah sebagai upaya kambinghitam (fitnah) kepada STR, penyebab masalah ialah akumulasi persoalan terkait izin HTI PT. RAPP, menilai secara moral izin HTI PT. RAPP merusak lingkungan serta menyarankan penyelesaian dengan menghentikan operasional perusahaan dan tinjau ulang izin HTI PT. RAPP.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar wartawan melakukan disiplin verifikasi yang ketat dalam menulis berita konflik, agar informasi yang disajikan pada khalayak dapat berimbang dan akurat.

2. Riau Pos dan Tribun Pekanbaru hendaknya lebih memberi ruang kepada kedua belah pihak agar dapat menyampaikan informasi dan pendapat terkait konflik yang terjadi hingga tidak terjadi bias. Dengan keberimbangan tersebut pembaca bias melihat dan menilai konflik yang telah terjadi dengan lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Bungin, Burhan ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Cangara, Hafied, Prof Dr, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Chaidir, drh, *Ironi Pulau Padang*,
<http://green.kompasiana.com/polusi/2012/01/04/ironi-pulau-padang>, 4 Januari 2012.
- Djuroto, Totok Drs Msi, *Manajemen Penerbitan Pers*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Effendi, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.
- Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi Ideology dan Politik Media*, Lkis, Yogyakarta, 2007.
- Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Professional*, Cinta Pena, Yogyakarta, 2005.
- Harsono, Andreas, *A9ama Saya Adalah Jurnalisme*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Irawan, Riyati dan Teguh Meinanda, *Tanya Jawab Dasar Dasar Jurnalistik*, Armico, Bandung, 1981.
- Koesworo, FX dkk, *Dibalik Tugas Kuli Tinta*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Luvleon, *Tema-tema Rubrik Humaniora di Harian Kompas*, <http://welcome-leoners.blogspot.com>, 26 September 2007.
- Malemi, Mardani, *Mengail Berkah Setelah Bencana (Wajah Retak Media)*, AJI Indonesia, Jakarta, 2009.

- McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa (edisi Kedua)*, Erlangga, Jakarta, 1989.
- Muhtadi, Asep Saeful, *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik*, Logos, Jakarta, 1999.
- Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- _____. *Jurnalisme Masa Kini*. Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Pusat Bahasa (tim penyusun), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Riduan, Muhammad, *STR Khawatir Konflik HTI PT RAPP*, <http://riduanmeranti.blogspot.com>, 3 September 2011.
- Sambo, Masriadi, *Jurnalisme Damai, Meretas Ideologi Peliputan di Arena Konflik*, <http://acehmagazine.com>, 1 Mei 2007.
- Santana, Septiawan K, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Saripudin, H A dan Qusyaini Hasan, *Tomi Winata Dalam Citra Media Analisis Berita Pers Indonesia*, Jari, Jakarta, 2003.
- Simbolon, Parakritik T Vademekum, *Wartawan Reportase Dasar*, Kepustakaan Popular Gramedia, Jakarta, 1997.
- Siregar, Ashadi dkk, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan, Yogyakarta, 1996.
- Sobur, Alex Drs Msi, *Analisis Teks Media*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Sudibyo, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, LkiS, Yogyakarta, 2001.
- Suhandang, Kustadi, *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi Produk dan Kode Etik*, Bandung, 2004.
- Tim SPS Cabang Riau, *Wajah Pers Riau*, Pekanbaru, 2007.
- Wikipedia, *Profil Kabupaten Kepulauan Meranti*, <http://id.wikipedia.org>, 2012.
- Company Profile Harian Riau Pos
- Company Profile Harian Tribun Pekanbaru

KORAN

Dokumentasi Harian Riau Pos: edisi 1 Juni 2011, edisi 2 Juni 2011

Dokumentasi Harian Tribun Pekanbaru: edisi 1 Juni 2011, edisi 2 Juni 2011, edisi 3 Juni 2011